

**ANALISIS KONTRIBUSI SEKTOR PARIWISATA TERHADAP  
PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN NGAWI  
TAHUN 2003-2010**

**TESIS**

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Mencapai Derajat Magister**

Program Studi Magister Ekonomi dan Studi Pembangunan  
Konsentrasi : Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Keuangan Daerah



Oleh :

**DHINA HANDAYANI  
S4210071**

**FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
PROGRAM PASCA SARJANA  
MAGISTER EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN  
SURAKARTA  
2012**

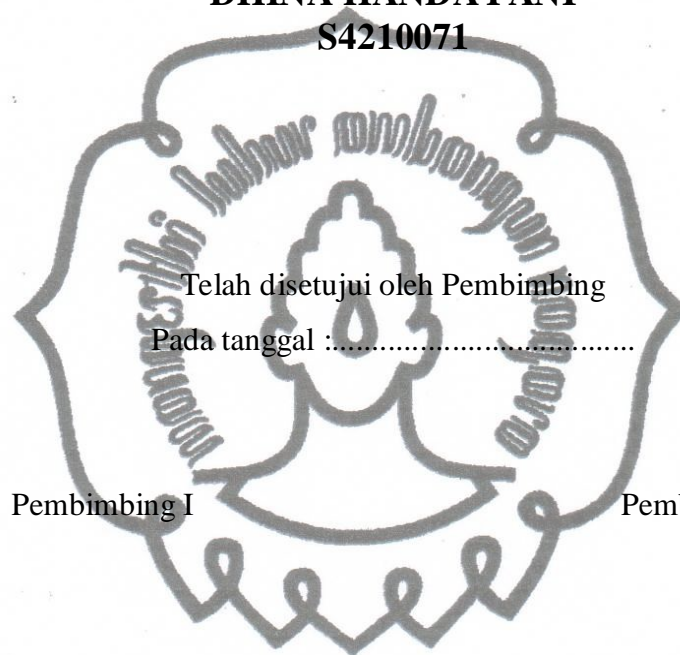
*commit to user*

**ANALISIS KONTRIBUSI SEKTOR PARIWISATA TERHADAP  
PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN NGAWI  
TAHUN 2003-2010**

Disusun oleh :

**DHINA HANDAYANI**

**S4210071**



Telah disetujui oleh Pembimbing

Pada tanggal : .....

Pembimbing I

Pembimbing II

**Dr. Yunastiti Purwaningsih, M.P**

**NIP. 19590613 198403 2 001**

**Drs. Akhmad Daerobi, M.S**

**NIP. 19570804 198601 1 002**

Ketua Program Studi

Magister Ekonomi dan Studi Pembangunan

**Dr. AM. Susilo, M.S**

**NIP. 19590328 198803 1 001**

*commit to user*

**ANALISIS KONTRIBUSI SEKTOR PARIWISATA TERHADAP  
PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN NGAWI  
TAHUN 2003-2010**

Disusun oleh :  
**DHINA HANDAYANI**  
**S4210071**

Telah disetujui dan disahkan oleh Tim Penguji  
Pada tanggal : .....



Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua Tim Penguji	Lukman Hakim, M.Si., Ph.D	_____
Pembimbing Utama	Dr. Yunastiti Purwaningsih, M.P	_____
Pembimbing Pendamping	Drs.Akhmad Daerobi, M.S	_____

Mengetahui,  
Direktur Program PPs UNS

Ketua Program Studi  
Magister Ekonomi dan Studi  
Pembangunan

**Prof. Dr. Ir. Ahmad Yunus, M.S**  
NIP. 19610717 198601 1 001 *commit to user*

**Dr. AM. Susilo, M.S**  
NIP. 19590328 198803 1 001

## PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : DHINA HANDAYANI

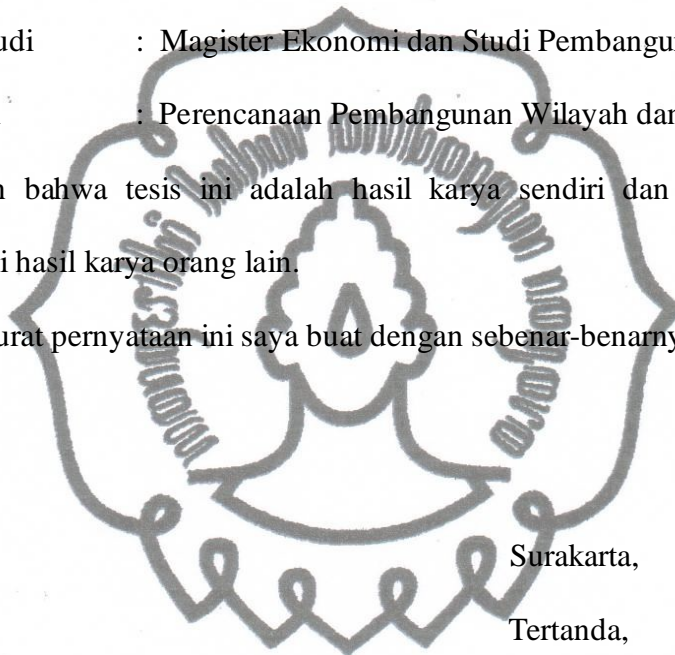
NIM : S4210071

Program Studi : Magister Ekonomi dan Studi Pembangunan

Konsentrasi : Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Keuangan Daerah

Menyatakan bahwa tesis ini adalah hasil karya sendiri dan bukan merupakan jiplakan dari hasil karya orang lain.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.



Surakarta, Januari 2012

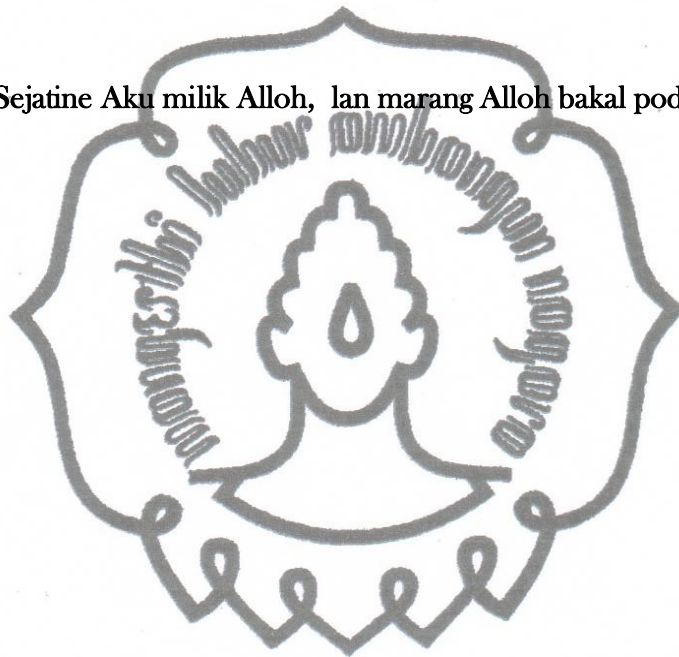
Tertanda,

**DHINA HANDAYANI**

## MOTTO :

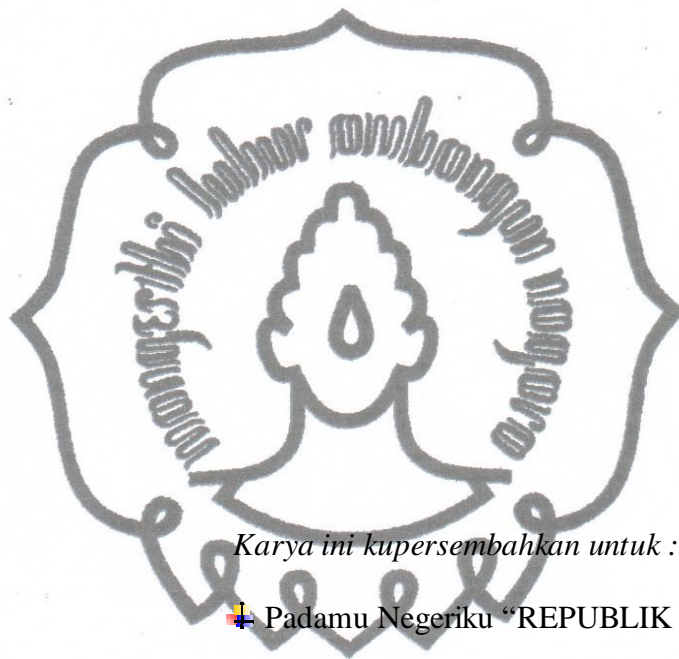
✚ **HIDUP** adalah **PERJUANGAN** “Mimpikan dirimu sebelum Tidur”

✚ “Sejatine Aku milik Alloh, lan marang Alloh bakal podho bali”



*commit to user*

## PERSEMBAHAN



*Karya ini kupersembahkan untuk :*

- ✚ Padamu Negeriku “REPUBLIK INDONESIA “
- ✚ Almamaterku MESP Universitas Surakarta
- ✚ Orang tuaku, Suami dan Anakku tersayang

*commit to user*

## ABSTRAKSI

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perkembangan pendapatan sektor pariwisata dan kontribusi sektor pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Ngawi. Dalam penelitian ini menggunakan jenis data sekunder tentang perkembangan pendapatan pariwisata dan kontribusi pendapatan sektor pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Ngawi. Hasil penelitian dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk menetapkan kebijakan-kebijakan pada sektor pariwisata guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah serta sebagai bahan informasi pendukung untuk melakukan penelitian sejenis secara lebih mendalam dan luas ruang lingkupnya.

Sejalan dengan tujuan tersebut maka penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisis trend, bahwa perkembangan pendapatan pariwisata mengalami peningkatan selama kurun waktu Tahun 2003-2010.

Berdasarkan hasil analisis dari penelitian maka perkembangan pendapatan pariwisata menunjukkan kecenderungan meningkat dan penurunan kontribusi sektor pariwisata tersebut diakibatkan karena kenaikan pendapatan sektor pariwisata diimbangi pula dengan kenaikan jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor-sektor lain dengan jumlah yang lebih besar.

*Kata kunci : Sektor Pariwisata, Pendapatan Asli Daerah (PAD).*

## ABSTRACT

Target of this research is to know Growth earnings of tourism sector and tourism sector contribution to Area Original Earnings (AOE) in Ngawi Regency. In this research use secunder data type about growth earnings of contribution and tourism earnings of tourism sector to Area Original Earnings (AOE) in Ngawi Regency. Result of research can be used by local government to specify policy at tourism sector utilize to Area Original Earnings and also upon which supporter information to do research of a kind morely wide of circumstantial its scope.

In line with the target hence this research is done by using trend analysis, that growth earnings of] natural tourism is make-up of during year range of time 2003-2010.

Pursuant to result of analysis from research hence growth earnings of tourism show tendency mount and degradation of the tourism sector contribution resulted because increase of earnings of tourism sector made balance to also with increase of is amount of Area Original Earnings (AOE) from other sector with amount of larger ones.

*Key Word : Tourism Sector, Area Original Earnings (AOE).*



## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa akhirnya penulis dapat menyelesaikan Tesis dengan judul :

**“ANALISIS KONTRIBUSI SEKTOR PARIWISATA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN NGAWI TAHUN 2003-2010”**

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tesis ini tidak lepas dari kendala-kendala yang dihadapi, namun demikian dengan ketulusan hati dari berbagai pihak yang banyak membantu memberi bimbingan, spirit moril dan bantuan, baik jasa, saran, pendapat, informasi, sangat-sangat memberi arti pada penulisan ini. Selanjutnya dengan kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Dr.AM. Susilo, MS selaku Ketua Program Studi Magister Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas Sebelas Maret Surakarta.
2. Ibu Dr.Yunastiti Purwaningsih, MP selaku Pembimbing I pada Program Studi Magister Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas Sebelas Maret Surakarta.
3. Bapak Drs. Akhmad Daerobi, MS selaku Pembimbing II pada Program Studi Magister Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas Sebelas Maret Surakarta.
4. Bapak Bupati dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi yang sudi memberi izin guna mengikuti pendidikan.

*commit to user*

5. Bapak Drs. Agus Santoso, M.Si, selaku Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Ngawi.
6. Bapak Warsito, S.Sos selaku Kasi Pariwisata pada Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Ngawi.
7. Dosen Pengajar Program Studi Magister Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas Sebelas Maret Surakarta.
8. Orang tuaku, Suamiku tercinta dan putriku tersayang yang telah memberikan dorongan dan semangat dalam penyelesaian tesis ini.
9. Segenap karyawan dan karyawan Program Studi Magister Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas Sebelas Maret Surakarta.
10. Teman-teman angkatan XIV yang selalu memberi spirit, selalu menjaga kekompakan baik dalam studi maupun dalam bekerja.
11. Semua pihak yang telah memberi bantuan informasi berharga, sehingga bisa selesai tepat pada waktunya.

Tesis ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu saran, pendapat, koreksi yang positif dan membangun sangat penulis harapkan. Semoga tesis ini bermanfaat bagi pembaca.

Surakarta, Januari 2012

Penulis

DHINA HANDAYANI

*commit to user*

## DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PENGUJI .....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
MOTTO .....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAKSI.....	vii
ABSTRACT .....	viii
KATA PENGANTAR .....	ix
DAFTAR ISI .....	xi
DAFTAR TABEL .....	xii
DAFTAR GAMBAR .....	xiii
<b>BAB I    PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
<b>BAB II    TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Kajian Teori.....	12
1. Pengertian Pariwisata .....	12

2. Definisi wisatawan.....	13
3. Tinjauan Tentang Pembangunan Sektor Pariwisata .....	14
4. Pariwisata Sebagai Industri.....	17
5. Kontribusi Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah.....	21
6. Peran Pemerintah Dalam Pengelolaan Pariwisata.....	34
7. Permintaan dan Penawaran Pariwisata.....	41
8. Keterkaitan Industri Pariwisata dan Pertumbuhan Ekonomi.....	45
B. Kajian Empiris.....	46
C. Kerangka Pemikiran.....	52
D. Hipotesis.....	54
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Tipe Penelitian .....	55
B. Jenis Data dan Sumber Data .....	55
C. Definisi Operasional Variabel .....	55
D. Tehnik Analisis Data .....	56
<b>BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Profil Kabupaten Ngawi.....	58
1. Geografis.....	58
2. Jumlah Penduduk Kabupaten Ngawi.....	60
3. Industri Perdagangan dan Pariwisata Kabupaten Ngawi.....	61
4. Industri Unggulan Kabupaten Ngawi .....	62
5. Hotel dan Penginapan di Kabupaten Ngawi.....	63
6. Restoran dan Rumah Makan .....	64
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Tentang Retribusi Sektor Pariwisata.....	66

8. Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Dari Retribusi Sektor  
Pariwisata..... 69

B. Hasil Analisis dan Pembahasan ..... 70

1. Perkembangan Pendapatan Sektor Pariwisata ..... 70

2. Kontribusi Pendapatan Sektor Pariwisata ..... 75

**BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan ..... 79

B. Saran ..... 80

**DAFTAR PUSTAKA**



## DAFTAR TABEL

	Hal.
1.1. Jumlah Wisatawan Obyek Wisata Kabupaten Ngawi Tahun 2003-2010 . .	9
4.1. Jumlah Penduduk Kabupaten Ngawi Tahun 2010 .....	60
4.2. Industri Perdagangan dan Pariwisata Kabupaten Ngawi Tahun 2010 .....	61
4.3. Industri Unggulan Kabupaten Ngawi Tahun 2010 .....	62
4.4. Daftar Hotel dan Penginapan di Kabupaten Ngawi .....	63
4.5. Daftar Restoran dan Rumah Makan di Kabupaten Ngawi Tahun 2010 ..	64
4.6. Pertumbuhan Realisasi dan Tingkat Pertumbuhan Pendapatan Sektor Pariwisata di Kabupaten Ngawi.....	71
4.7. Perhitungan Pendapatan Pariwisata .....	73
4.8. Hasil Perhitungan Trend Perkembangan Pendapatan Pariwisata.....	74
4.9. Perhitungan Sektor Pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)...	76

*commit to user*

## DAFTAR GAMBAR

	Hal.
2.2 Kerangka Pemikiran .....	53
4.1. Profil Kabupaten Ngawi .....	58



*commit to user*

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Setiap negara di dunia, baik negara miskin, negara sedang berkembang, bahkan negara maju sekali pun mutlak memerlukan pembangunan perekonomian. Perekonomian dibangun guna meningkatkan dan mengangkat taraf hidup serta kesejahteraan masyarakat. Pembangunan perekonomian dapat dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki masing-masing bangsa atau daerah secara maksimal tanpa mengurangi perhatian pada aset lingkungan dan kesejahteraan masyarakat sekitar. Landasan utama dari pembangunan perekonomian adalah stabilitas, distribusi pendapatan yang merata (sesuai dengan proporsi masing-masing), pertumbuhan ekonomi yang dinamis dan neraca pembayaran yang seimbang, serta efisiensi disegala bidang.

Indonesia sebagai salah satu negara yang sedang berkembang tentu saja mempunyai cita-cita dan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengangkat taraf hidup masyarakat (sesuai undang-undang dasar” 45 alenia IV). Maka pembangunan perekonomian harus ditingkatkan dan dilaksanakan secara maksimal. Setiap pembangunan walaupun sekecil apapun pasti memerlukan dana apalagi membangun perekonomian negara sebesar indonesia dengan jumlah penduduk sekitar 220 juta jiwa lebih. Terdapat beberapa sumber pendanaan pembangunan baik yang bersumber dari dalam maupun luar negeri (Suparmoko,1992 : 94).

*commit to user*



1. Pendapatan pajak, adalah iuran dari masyarakat kepada pemerintah yang dapat dipaksakan tanpa adanya balas jasa secara langsung.
2. Retribusi, adalah pemberian dari masyarakat kepada pemerintah dimana terdapat hubungan balas jasa yang langsung diterima dengan adanya pembiayaan retribusi tersebut.
3. Keuntungan dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
4. Sumber pendanaan dari luar negeri, adalah bantuan atau hibah yang diperoleh dari pinjaman luar negeri dan penanaman modal asing (PMA).

Demi tercapainya cita-cita dan tujuan untuk mensejahterakan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat, maka pemerintah dalam melaksanakan pembangunan seharusnya tidak terbatas pada pembangunan sektor perekonomian semata, namun sektor-sektor lain yang saling terkait juga harus diupayakan pembangunannya. Salah satu sektor yang tergantung pada sektor lain yaitu sektor pariwisata yang sangat tergantung pada stabilitas Nasional dan jaminan keamanan, tetapi masih belum terlalu diperhatikan dan digarap secara maksimal.

Sektor pariwisata yang sangat terkait dengan sektor lain, merupakan suatu tantangan tersendiri bagi pemerintah untuk memberikan yang terbaik bagi “tamu” yang datang berkunjung mulai dari jaminan keamanan dan kenyamanan selama berada di wilayah Indonesia. Industri pariwisata diharapkan mampu menunjukkan peranannya pada sektor perekonomian, sosial, budaya, penerimaan devisa, lapangan pekerjaan, serta sebagai wahana mengatasi konflik yang terjadi di negara dengan kemajemukan yang luar biasa seperti indonesia.

Negara Indonesia memiliki potensi alam, keanekaragaman flora dan fauna, peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, serta seni dan budaya yang semuanya merupakan sumber daya modal yang besar artinya bagi usaha pengembangan dan peningkatan kepariwisataan. Modal tersebut harus dimanfaatkan secara optimal melalui penyelenggaraan kepariwisataan yang secara umum bertujuan untuk meningkatkan Pendapatan Nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. Berdasarkan data statistik, tercatat bahwa sektor pariwisata memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap perekonomian nasional. Tahun 2002 target perolehan dari sektor pariwisata sebesar 516,035,600 juta, dan tahun 2003 sebesar 606,563,875 juta, sedangkan target 2004 sebesar 610,164,775 juta. Dengan potensi wisata yang dimiliki masih memungkinkan peluang peningkatan penerimaan negara dari sektor pariwisata.

Meskipun demikian, sektor pariwisata sangat rentan terhadap faktor-faktor lingkungan alam, keamanan, dan aspek global lainnya. Contoh kerusakan alam adalah rusaknya terumbu karang hampir disepanjang pantai Indonesia, padahal terumbu karang dan segala kehidupan yang ada didalamnya merupakan salah satu kekayaan alam yang dimiliki dan tidak ternilai harganya. Sebagai contoh lainnya perkembangan-perkembangan ekonomi, sosial, budaya dan politik global mempengaruhi penyelenggaraan kegiatan pariwisata.

Negara Indonesia pun turut menikmati dampak dari peningkatan pariwisata dunia terutama pada periode 1990-1996, namun badai krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak tahun 1997 hal tersebut merupakan pengalaman yang sangat berharga bagi masyarakat pariwisata Indonesia untuk melakukan

*repositioning* sekaligus re-vitalization kegiatan pariwisata indonesia. Disamping itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Program Perencanaan Nasional. Menghadapi tantangan dan peluang ini, telah dilakukan pula perubahan peran pemerintah dibidang kebudayaan dan pariwisata yang pada masa lalu berperan sebagai pelaksana pembangunan, saat ini lebih difokuskan hanya kepada tugas-tugas pemerintahan terutama sebagai fasilitator agar kegiatan pariwisata yang dilakukan oleh swasta dapat berkembang lebih pesat. Peran fasilitator disini dapat diartikan sebagai menciptakan iklim yang nyaman agar para pelaku kegiatan kebudayaan dan pariwisata dapat berkembang secara efisien dan efektif. Selain itu sub sektor pariwisata diharapkan dapat menggerakkan ekonomi rakyat, karena dianggap sektor yang paling siap dari segi fasilitas, sarana dan prasarana dibandingkan dengan sektor usaha lainnya. Harapan ini dikembangkan dalam suatu strategi pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan pariwisata yang berbasis kerakyatan atau *community-based tourism development*.

Sebagai industri perdagangan jasa, kegiatan pariwisata tidak terlepas dari peran serta pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pemerintah bertanggung jawab atas empat hal utama yaitu: perencanaan (*planning*) daerah atau kawasan pariwisata, pembangunan (*development*) fasilitas utama dan pendorong pariwisata, pengeluaran kebijakan (*pollicy*) pariwisata, dan pembuatan dan penegakan peraturan (*regulation*). Selain peran pemerintah sebagai fasilitator ternyata peran masyarakat juga sangat berpengaruh. Dimana masyarakat merupakan sekelompok orang yang berada di suatu wilayah geografi yang sama dan memanfaatkan sumber daya alam lokal yang ada di sekitarnya. Di

negara-negara maju dan berkembang, pada umumnya pariwisata dikelola oleh kalangan swasta yang memiliki modal usaha yang besar yang berasal dari luar daerah dan bahkan luar negeri. Sehingga masyarakat lokal yang berada di suatu daerah destinasi atau tujuan pariwisata tidak dapat terlibat langsung dalam kegiatan pariwisata. Ketidakterlibatan masyarakat lokal dalam kegiatan pariwisata sering menimbulkan opini bahwa masyarakat lokal bukan termasuk *stakeholders* dari pariwisata dan merupakan kelompok yang termarginalisasi dari kesempatan bisnis dalam bidang pariwisata.

Pada dasarnya masyarakat lokal memiliki pengetahuan tentang fenomena alam dan budaya yang ada di sekitarnya. Namun mereka tidak memiliki kemampuan secara finansial dan keahlian yang berkualitas untuk mengelolanya atau terlibat langsung dalam kegiatan pariwisata yang berbasis alam dan budaya. Sejak beberapa tahun terakhir ini, potensi-potensi yang dimiliki oleh masyarakat lokal tersebut dimanfaatkan oleh para pengelola wilayah yang dilindungi (*protected area*) dan pengusaha pariwisata untuk ikut serta dalam menjaga kelestarian alam yang ada di daerahnya. Sehingga diharapkan masyarakat lokal harus terlibat secara aktif dalam pengembangan pariwisata. Pariwisata juga diharapkan memberikan peluang dan akses kepada masyarakat lokal untuk mengembangkan usaha pendukung pariwisata seperti; toko kerajinan, toko cinderamata (*souvenir*), warung makan dan lain-lain agar masyarakat lokalnya memperoleh manfaat ekonomi yang lebih banyak dan secara langsung dari wisatawan yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidupnya. Tingkat keterlibatan masyarakat dalam pariwisata sangat berbeda dan ini

*commit to user*

tergantung dari jenis potensi, pengalaman, pengetahuan dan keahlian yang dimiliki oleh individu atau masyarakat lokal tersebut.

Selain masyarakat dalam menjalankan perannya, industri pariwisata harus menerapkan konsep dan peraturan serta panduan yang berlaku dalam pengembangan pariwisata agar mampu mempertahankan dan meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan yang nantinya bermuara pada pemberian manfaat ekonomi bagi industri pariwisata dan masyarakat lokal. Industri-industri pariwisata yang sangat berperan dalam pengembangan pariwisata adalah: biro perjalanan wisata, hotel dan restoran. Selain itu juga didukung oleh industri-industri pendukung pariwisata lainnya.

Kebijaksanaan pembangunan kepariwisataan nasional dan daerah ini diarahkan menjadi andalan untuk menggerakkan kegiatan ekonomi dan sekaligus dapat berperan dalam menciptakan peluang lapangan dan kesempatan kerja (yayasan diakonia gloria: 2002). Pembangunan kepariwisataan merupakan salah satu sektor andalan pembangunan suatu daerah. Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata termasuk penguasaan objek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait dibidang tersebut. Pembangunan sektor kepariwisataan diharapkan akan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan memperbaiki kesejahteraan hidup masyarakat. Berbagai program partisipasi dan bantuan pembangunan kepariwisataan telah dilakukan di beberapa daerah oleh lembaga Internasional, Pemerintah pusat, Pemerintah daerah, lembaga ilmiah, lembaga swadaya masyarakat, swasta dan perseorangan guna menunjang pengembangan sektor kepariwisataan di suatu daerah.

Sebagai wujud otonomi daerah, maka Kabupaten Ngawi diharapkan mampu untuk mengelola perekonomiannya sendiri. Sehingga pengembangan sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang dinilai dapat memberikan sumbangan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Ngawi, dimana otonomi daerah sebagai wujud pelaksanaan desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintah, yang mempunyai tujuan yaitu untuk meningkatkan pelayanan publik (*public service*).

Pada dasarnya terkandung tiga misi utama pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, yaitu (1) meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan pelayanan masyarakat, (2) menciptakan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya daerah, dan (3) memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat (publik) untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan (Mardiasmo, 2002 : 47).

Undang-Undang tentang Otonomi Daerah yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah. Otonomi daerah ditempatkan secara utuh pada daerah Kabupaten atau Kota. Kehadiran dua paket Undang-undang tersebut menjanjikan sebuah harapan sekaligus tantangan pemerintah daerah. Untuk dapat memainkan peran dengan baik dalam kompetisi global, salah satu strategi yang paling efektif adalah berperan dengan lebih aktif dalam memanfaatkan potensi yang ada secara optimal. Pariwisata sebagai industri yang mampu melengkapi dan mempercepat pertumbuhan industri-industri lain diharapkan mampu memberikan manfaat yang sebesar-besarnya. Kabupaten

*commit to user*

Ngawi juga memiliki potensi pariwisata yang tidak kalah menarik. Berbagai obyek wisata yang ada di Kabupaten Ngawi seperti obyek wisata budaya, wisata sejarah dan wisata religi apabila dikembangkan secara optimal akan memberi kontribusi positif bagi Kabupaten Ngawi.

Dalam hal ini sebagai pengelola sektor pariwisata adalah Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Ngawi. Dinas pariwisata adalah salah satu unsur pelaksana program dari pemerintah di bidang pariwisata dan didalam menjalankan kegiatan berkewajiban membuat laporan pelaksanaan tugas. Laporan pelaksanaan tugas adalah salah satu faktor penting yang sangat menentukan suatu kebijaksanaan pelaksanaan program pemerintah yang akan memperjelas visi dan misi kekinisan, sehingga mempermudah menentukan arah kebijaksanaan yang akan dilaksanakan dan sebagai evaluasi pelaksanaan kegiatan dari program yang telah ditentukan dalam 1 (satu) Tahun Anggaran.

Kabupaten Ngawi merupakan salah satu daerah yang dianggap mempunyai potensi daerah yang dapat digunakan sebagai penyelenggara obyek pariwisata. Dimana pariwisata sebagai salah satu potensi unggulan di Kabupaten Ngawi membutuhkan pengelolaan yang baik dan terencana agar memperoleh hasil yang optimal bagi daerah dan layak menjadi potensi unggulan yang dibanggakan. Hal ini dapat disajikan dalam Tabel 1.1.

**Tabel 1.1. Jumlah Wisatawan Obyek Wisata Kabupaten Ngawi Tahun 2003- 2010**

Tahun	Jumlah Wisatawan
2003	12.513
2004	12.717
2005	12.275
2006	12.513
2007	12.906
2008	12.906
2009	26.309
2010	31.839

Sumber : Disporabudpar Kabupaten Ngawi, 2003-2010

Di Kabupaten Ngawi paling tidak terdapat 10 obyek wisata, baik wisata alam, rekreasi, wisata sejarah dan purbakala, wisata ritual, ziarah, spritual, maupun agrowisata atau wisata pertanian. Namun tidak semua arena wisata itu dikenal masyarakat dan laku dijual serta mendatangkan pengunjung. Dari 10 obyek wisata itu, ternyata hanya sekitar 3 obyek saja yang efektif. Dan ini diperlukan usaha dari Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata untuk mengembangkan obyek-obyek yang tidak efektif menjadi suatu obyek yang mempunyai daya tarik untuk dikunjungi wisatawan. Untuk dapat menjadikan sektor pariwisata menjadi sektor yang potensial bagi daerah yang bertujuan untuk memperbesar Pendapatan Asli Daerah dan diharapkan dapat memberikan *commit to user* sumbangan dalam kegiatan ekonomi daerah di Kabupaten Ngawi.



Agar usaha pemerintah daerah Kabupaten Ngawi dapat berjalan dengan baik sesuai program dan visi yang telah dibuat maka saat ini perlu untuk menjalin kerjasama dengan daerah lain serta beberapa pemilik travel wisata dalam rangka melakukan promosi wisata. Tak jarang Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi juga memberikan kesempatan kepada para investor yang mau melakukan investasi karena dalam pengembangan tempat wisata tersebut dibutuhkan biaya yang tidak dapat hanya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) saja, selain itu perlunya menjalin kerjasama dengan praktis bidang kepariwisataan.

Dari uraian maka dapat disimpulkan bahwa sektor pariwisata merupakan sektor yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Berdasarkan uraian dan fenomena, mendorong dilakukannya penelitian tentang **“ANALISIS KONTRIBUSI SEKTOR PARIWISATA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN NGAWI TAHUN 2003-2010 ”**

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perkembangan pendapatan sektor pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Ngawi periode Tahun 2003-2010?
2. Bagaimana kontribusi sektor pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Ngawi periode Tahun 2003-2010?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perkembangan pendapatan sektor pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Ngawi periode Tahun 2003-2010.
2. Untuk mengetahui perkembangan kontribusi sektor pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Ngawi periode Tahun 2003-2010.

### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat dan kontribusi sebagai berikut:

1. Hasil penelitian dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk menetapkan kebijakan- kebijakan pada sektor pariwisata guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
2. Hasil penelitian sebagai bahan informasi pendukung untuk melakukan penelitian sejenis secara lebih mendalam dan luas ruang lingkupnya.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Kajian Teoritis

##### 1. Pengertian Pariwisata

Pengertian kata pariwisata berasal dari bahasa sansekerta yaitu kata “pari” yang berarti banyak; berkali-kali; berputar-putar, kata “wisata” yang berarti perjalanan; bepergian. Pariwisata dalam bahasa Inggris adalah “Tour” yang diartikan dalam kamus sebagai perjalanan atau bepergian untuk kesenangan mengunjungi berbagai tempat yang menarik, atau kunjungan singkat atau kunjungan lewat suatu tempat (Spillane, 2001: 22).

Tourism diartikan sebagai bisnis dalam memberikan akomodasi dan pelayanan bagi para turis (*Tourism*). Menurut (Kodyat, 1983) pariwisata atau wisata adalah perjalanan atau persinggahan yang dilakukan oleh manusia diluar tempat tinggalnya untuk berbagai maksud dan tujuan, tetapi bukan untuk tinggal menetap ditempat yang dikunjungi atau disinggahi atau untuk melakukan pekerjaan dengan mendapat upah (Santoso: 2006).

Ekonomi yang cepat dalam hal kesempatan kerja, pendapatan, taraf hidup dalam mengaktifkan sektor produksi lain didalam penerimaan wisatawan. (Gromang, 2003). Pariwisata juga dapat diartikan sebagai rencana atau kegiatan yang melakukan perjalanan yang mungkin kurang dari sehari (*day tripper/visitor*) atau juga sebuah perjalanan dalam sebuah batasan nasional secara umum disebut

*commit to user*

turis domestik, atau juga berarti sebuah perjalanan antar negara yang diklasifikasikan sebagai perjalanan wisata internasional.

## 2. Definisi Wisatawan

Wisatawan (*tourism*) yaitu seorang atau sekelompok orang yang melakukan suatu perjalanan wisata, jika lama tinggalnya sekurang-kurangnya 24 jam di daerah atau negara yang dikunjungi. Namun apabila mereka tinggal di daerah atau negara yang dikunjungi dengan waktu kurang dari 24 jam maka mereka disebut pelancong *excursionist* (Suwantoro, 2004).

Menurut instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1969 yang tertulis dalam bab 1 pasal 1, wisatawan adalah setiap orang yang bepergian dari tempat tinggalnya untuk berkunjung ketempat lain dengan menikmati perjalanan dari kunjungan itu (Spillane : 2001).

Menurut Spillane, wisatawan ialah pengunjung sementara yang tinggal sekurang-kurangnya 24 jam dinegara yang dikunjungi dan tujuan perjalananya dapat digolongkan sebagai berikut (Spillane, 2001) :

- a. Pesar yaitu untuk keperluan rekreasi, liburan, kesehatan, studi, keagamaan dan olah raga.
- b. Hubungan dagang, sanak keluarga, handai taulan, konferensi dan misi.

Wisatawan pada umumnya yaitu sekelompok orang yang berkunjung disuatu daerah untuk melakukan suatu perjalanan wisata, namun tidak untuk tinggal di daerah tujuan tersebut maupun bekerja untuk mendapatkan upah.

### 3. Tinjauan Tentang Pembangunan Sektor Pariwisata

Menurut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Ngawi, Pembangunan kepariwisataan diarahkan pada meningkatnya pariwisata menjadi sektor yang mampu menggalakkan kegiatan ekonomi, termasuk kegiatan di sektor pertanian, industri kecil dan kerajinan serta jasa-jasa sehingga pendapatan masyarakat, daerah dan negara serta penerimaan devisa meningkat (Dispora Kabupaten Ngawi, 2007: 9). Upaya pengembangan dan pendayagunaan potensi kepariwisataan ditujukan untuk meningkatkan daya tarik bagi wisatawan, baik wisatawan Nusantara maupun wisatawan Mancanegara. Di samping daya tarik alam, kemajuan teknologi dan angkutan merupakan penunjang utama perkembangan pariwisata (Samsuridjal dan Kaelany, 1996: 41).

Dalam pengembangan kepariwisataan harus dijaga tetap terpeliharanya kepribadian bangsa serta kelestarian dan mutu lingkungan hidup. Kepariwisataan perlu ditata secara menyeluruh dan terpadu dengan melibatkan sektor-sektor lain yang terkait dalam suatu keutuhan berbagai usaha kepariwisataan yang saling menunjang, baik yang berskala kecil, menengah maupun besar. Pengembangan pariwisata dilaksanakan sejalan dengan upaya memupuk rasa cinta tanah air dan bangsa, serta menanamkan jiwa, semangat dan nilai-nilai luhur bangsa dalam rangka lebih memperkuat persatuan dan kesatuan nasional terutama dalam bentuk penggalakan pariwisata remaja.

Pengembangan obyek dan daya tarik wisata perlu ditingkatkan. Begitu pula upaya pengenalan obyek dan daya tarik obyek wisata kepada wisatawan melalui kegiatan dan pemasaran terus ditingkatkan secara terencana, terpadu dan

terarah dengan memanfaatkan secara optimal kerja sama kepariwisataan regional nasional. Karena dari hasil pemantauan sementara jelas bahwa frekuensi kunjungan obyek wisata yang ada di kabupaten Ngawi masih sangat kecil, baik wisatawan mancanegara maupun wisatawan domestik. Beberapa faktor penyebabnya adalah :

- a. Kurangnya daya tarik obyek yang ada, terhadap sclera yang diinginkan oleh masyarakat calon penikmat obyek tersebut.
- b. Kurangnya promosi kepada masyarakat, karena sangat aneh ada sebagian orang Ngawi tapi belum tahu obyek wisata apa saja yang ada di Kabupaten Ngawi apalagi orang di luar Ngawi.
- c. Kurangnya pemahaman manfaat obyek wisata terhadap pendidikan anaknya. Sehingga untuk yang terakhir ini perlu adanya kerja sama pihak pariwisata dengan lembaga pendidikan yang ada, dalam rangka menyadarkan akan pentingnya obyek wisata pendidikan yang ada di Ngawi, misalnya dengan memberikan keringanan bagi kunjungan sekolah secara kolektif dan berpakaian seragam sekolah.
- d. Faktor keamanan, baik keamanan di obyek wisata maupun keamanan pada pesawat menuju negara tujuan.
- e. Faktor penyakit menular yang sedang melanda suatu negara.

Walaupun banyak jenis wisata ditentukan menurut motif tujuan perjalanan, dapat pula dibedakan adanya beberapa jenis pariwisata khusus sebagaimana yang diuraikan oleh Spillane (2001: 29-35 ) sebagai berikut :

a. Pariwisata untuk menikmati perjalanan (*Pleasure tourism*)

Bentuk pariwisata ini dilakukan oleh orang-orang yang meninggalkan tempat tinggalnya untuk berlibur. Untuk mencari udara segar yang baru untuk menikmati keindahan alam serta mendapatkan ketenangan dan kedamaian di daerah di luar kota. Jenis pariwisata ini menyangkut begitu banyak unsur yang berbeda-beda, disebabkan pengertian *Pleasure* akan selalu berbeda kadar pemuasnya sesuai dengan karakter, cita rasa, latar belakang kehidupan serta temperamen masing-masing individu.

b. Pariwisata untuk Rekreasi (*Recreation tourism*)

Jenis pariwisata ini dilakukan oleh orang-orang yang menghendaki pemanfaatan hari-hari liburannya untuk beristirahat, atau untuk memulihkan kesegaran jasmani dan rohaninya. Biasanya mereka tinggal selama mungkin di tempat yang dianggapnya benar-benar mencapai tujuan rekreasi tersebut.

c. Pariwisata untuk Kebudayaan (*Culture tourism*)

Jenis pariwisata ini ditandai oleh adanya rangkaian motivasi seperti keinginan belajar di pusat-pusat pengajaran dan riset, untuk mempelajari adat istiadat, kelembagaan dan cara hidup rakyat negara lain; untuk mengunjungi monumen bersejarah, peninggalan peradaban masa lalu dan sebaliknya penemuan-penemuan besar masa kini, pusat-pusat kesenian, pusat-pusat keagamaan atau juga untuk ikut serta dalam kegiatan kesenian.

d. Pariwisata untuk Olahraga (*Sport Tourism*)

Jenis pariwisata olah raga ini dapat diklasifikasikan dalam 2 bentuk Big  
*commit to user*

Sport Evebt, yaitu peristiwa-peristiwa olah raga besar seperti Olympiade Game, Kejuaraan Sky Dunia, Kejuaraan Tinju Dunia dan sebagainya.

e. Pariwisata untuk Urusan Dagang (*Business Tourism*)

Banyak ahli teori, sosiologi ataupun ekonomi beranggapan bahwa perjalanan untuk keperluan usaha tidak dapat dianggap sebagai perjalanan kepada pelakunya baik pilihan daerah tujuan maupun pilihan waktu perjalanan. Dalam istilah business tourism tersirat tidak hanya profesional trips yang dilakukan oleh kaum pengusaha atau industrialis, tetapi juga mencakup semua kunjungan ke pameran, kunjungan ke instalasi teknis yang bahkan menarik orang-orang di luar profesi ini.

f. Pariwisata Untuk Berkonvensi (*Convention Tourism*)

Konvensi dan pertemuan sering dihadiri oleh ratusan bahkan ribuan peserta; yang biasanya tinggal beberapa hari di kota atau negara penyelenggara. Jika pada taraf-taraf perkembangannya konvensi-konvensi semacam itu hanya dilakukan secara tradisional di beberapa kota tertentu, maka sekarang berbagai Tourism resort atau daerah-daerah wisata banyak yang menawarkan diri untuk dijadikan tempat konferensi.

#### 4. Pariwisata Sebagai Industri

Industri pariwisata terdiri dari beberapa komponen yang merupakan mata rantai yang panjang. Menurut Samsuridjal dan Kaelany (1996:74) komponen-komponen tersebut antara lain (a) Biro perjalanan; (b) Motel dan restoran; (c) Usaha angkutan; (d) Suvenir (cinderamata). (f) Bandar udara; Agar wisatawan  
*commit to user*



dapat menikmati produk wisata, maka seluruh komponen tersebut harus merupakan satu kesatuan yang saling menjalin kerja sama yang serasi. Menurut Kodyat (1996: 37) yang disebut sebagai industri pariwisata karena unsur-unsur sarana kepariwisataan termasuk di dalamnya biro perjalanan yang berinteraksi dengan komponen-komponen lainnya. Pengertian industri pariwisata ialah perusahaan-perusahaan (*establishment*) yang menitik beratkan kegiatan pada pelayanan (*service*) bagi wisatawan.

#### a. Agen Perjalanan

Khusus di Indonesia dikenal 2 jenis bidang usaha perjalanan dengan lingkup jenis layanan yang mempunyai fungsi berbeda-beda satu dengan lainnya. (1) adalah usaha perjalanan yang disebut Agen Perjalanan ini hanya mempunyai fungsi dan jenis layanan penjualan tiket di berbagai sarana transportasi. Dengan demikian pada hakekatnya suatu agen perjalanan hanya merupakan kepanjangan tangan atau agen dari bidang-bidang transportasi. (2) Agen perjalanan kedua adalah usaha perjalanan yang disebut biro perjalanan wisata atau *tour operator*. Fungsi dan jenis layanan yang diberikan oleh *tour operator* yaitu penyelenggaraan paket-paket wisata termasuk pemesanan tiket, kamar hotel dan pengaluran transportasi. Dengan demikian dapat dikatakan biro perjalanan wisata mempunyai lingkup fungsi dan jenis layanan yang lebih luas bila dibandingkan dengan yang diberikan agen perjalanan Biro (Wings, 1978:82)

#### b. Perjalanan Skala Besar

Di Negara-negara maju ada suatu bidang usaha perjalanan yang disebut *whole saler*. Lingkup fungsi dan jasa layanan yang diberikan oleh *whole saler* *commit to user*

adalah sama dengan tour operator namun dengan skala lebih besar *Whole saler* tidak langsung berhubungan dengan para langganan dan juga tidak menjual tiket. karena yang menjual tiket hanyalah *travel agency*, *tour operator* di luar negeri juga tidak menjual tiket seperti di Indonesia.

Sebuah *whole saler* mempunyai paket-paket wisata ke seluruh penjuru dunia. *Whole saler* mendapatkan langganan dari tour operatoi yang lebih kecil. Di negara tujuan wisata *whole saler* bekerjasama dengan *tour operator* yang ada di negara tujuan wisata tersebut. Dengan demikian *tour operator* yang ada di negara tujuan wisata pada hakekatnya berfungsi sebagai *Handling agent* dari *whole saler* di luar negeri. Tapi sebaliknya mereka juga dapat dikatakan berfungsi sebagai perwakilan *tour operator* dari negara tujuan wisata.

Di Indonesia *whole saler* seperti di luar negeri dapat dikatakan belum ada. Namun demikian beberapa biro perjalanan wisata yang cukup besar dapat dikatakan sebagai *whole saler*. Biro perjalanan yang cukup besar tersebut juga bekerjasama dengan *tour operator* dari negara-negara yang tercakup dalam paket wisata yang diselenggarakan oleh *tour operator*.

Dalam pembahasan sektor pariwisata sebagai industriterdapat beberapa kesamaan dan perbedaan dengan industri biasanya. Kesamaan tersebut dapat dilihat bahwa : Masing-masing mempunyai masukan, berupa bahan mentah. tenaga. modal untuk menghasilkan produk. Masing-masing juga perlu menyelenggarakan kegiatan pemrosesan, setelah selesai hasil pemrosesan perlu dipromosikan dan selanjutnya dipasarkan.

Dalam hubungannya dengan aspek ekonomis pariwisata ini berkembang konsep industri pariwisata. Dimana pengertian industri dalam ilmu ekonomi adalah sekelompok perusahaan yang sejenis yang memproduksi atau menghasilkan produk tertentu. Dalam hal ini perusahaan yang dimaksud adalah perusahaan yang mengelola potensi wisata dengan produk wisata (Spillane, 2001).

Pengertian produk dalam ilmu ekonomi adalah sesuatu yang dihasilkan melalui proses produksi, dimana penekanan utamanya adalah bahwa tujuan akhir dari suatu proses produksi dapat digunakan untuk berbagai tujuan guna memenuhi kebutuhan manusia (Suwanto, 2004). Menurut Suwanto (2004) produk pariwisata adalah keseluruhan pelayanan yang diperoleh, atau dinikmati wisatawan semenjak ia meninggalkan tempat tinggalnya, sampai ke daerah tujuan wisata.

Namun produk wisata bukanlah suatu produk yang nyata. Produk ini merupakan suatu rangkaian yang tidak hanya mempunyai segi yang bersifat ekonomis tetapi yang bersifat sosial, psikologis dan alam, walaupun produk wisata itu sendiri sebagian besar dipengaruhi oleh tingkah laku ekonomi sedangkan produk-produk wisata tersebut mempunyai beberapa ciri-ciri yaitu:

- a. Hasil atau produk wisata tidak dapat dipindahkan;
- b. Produksi dan konsumsi terjadi pada tempat dan saat yang sama;
- c. Produk wisata tidak menggunakan standar ukuran fisik tetapi menggunakan standar pelayanan yang didasarkan atas suatu kriteria tertentu;
- d. Konsumen tidak mencicipi atau mencoba contoh itu sebelumnya;

- e. Hasil atau produk wisata itu banyak tergantung pada tenaga manusia dan hanya sedikit yang menggunakan mesin;
- f. Produk wisata merupakan usaha yang mengandung resiko besar (Suwantoro, 2004: 49).

Kegiatan dalam rangkaian memajukan pariwisata sebagai industri sebenarnya ditunjang oleh berbagai macam usaha yang perlu dikelola secara terpadu dan baik. Diantaranya menurut Spillane (2001: 91) adalah:

- a. Kegiatan promosi untuk memperkenalkan obyek wisata;
- b. Pengadaan sarana transportasi yang lancar;
- c. Kemudahan birokrasi atau keimigrasian;
- d. Akomodasi yang menjamin penginapan yang nyaman;
- e. Pemandu wisata yang cakap;
- f. Penawaran barang dan jasa dengan mutu terjamin dan tarif harga yang wajar;
- g. Pengisian waktu dengan atraksi-atraksi yang menarik;
- h. Kondisi kebersihan dan kesehatan lingkungan;

## **5. Kontribusi Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah**

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ditetapkan mengenai sumber Pendapatan Daerah adalah :

### **a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber penerimaan daerah dalam membiayai pengeluaran daerah. Sumber Pendapatan

Asli Daerah menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Bab V Pasal 6, terdiri dari :

1) Pajak Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari pajak daerah memiliki peran strategis bagi daerah, karena pajak daerah memberikan kontribusi terbesar dalam pembentukan Pendapatan Asli Daerah, kemudian disusul retribusi daerah. Pajak Daerah yang identik dengan pajak memiliki beberapa pengertian yang dikemukakan oleh para ahli.

Pengertian Pajak menurut Djajadiningrat yang dikutip oleh Munawir (1992) adalah suatu kewajiban menyerahkan sebagian daripada kekayaan kepada negara disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa balik dari Negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum. Pendapat senada dengan pengertian sebelumnya, menyatakan bahwa pajak adalah pembayaran yang dilakukan oleh masyarakat dalam keseluruhannya untuk jasa-jasa pemerintah. Akan tetapi, jumlah yang dibayarkan oleh orang tidak perlu mempunyai hubungan dengan jumlah-jumlah kegiatan pemerataan yang diterimanya, yang seringkali tidak dapat dihitung atau diukur sedangkan menurut sifatnya merupakan paksaan (Due, 1985).

Mangkoesebroto (1994) menyatakan, definisi pajak (termasuk pajak daerah/regional tax) adalah suatu pungutan yang merupakan hak *commit to user*

prerogatif pemerintah, dimana pungutan tersebut dapat dipaksakan kepada subyek pajak dan tidak ada balas jasa yang langsung dapat ditunjukkan penggunaannya. Definisi Suparmoko (1985) adalah pembayaran iuran oleh rakyat kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dengan tanpa balas jasa secara langsung dapat ditunjuk, misalnya pajak kendaraan bermotor, pajak penjualan dan lain sebagainya.

Beberapa definisi pajak diatas merupakan pengertian mendasar, sehingga hampir tidak ada perbedaan dengan pengertian pajak daerah. Pengertian Pajak menurut Davey (1988) dapat diartikan sebagai : (1) Pajak yang dipungut oleh pemerintah Daerah dengan pengaturan dari daerah sendiri; (2) Pajak yang dipungut berdasarkan peraturan Nasional tetapi penetapan tarifnya dilakukan oleh Pemerintah Daerah; (3) Pajak yang ditetapkan atau dipungut oleh Pemerintah Daerah; (4) Pajak yang dipungut dan diadministrasikan oleh Pemerintah Pusat tetapi hasil pungutan dibebani dengan pungutan tambahan (opsen) oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, memberikan definisi “ Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Berdasarkan beberapa pengertian pajak diatas, disimpulkan bahwa pengertian pajak daerah adalah pajak asli daerah, maupun pajak yang diserahkan ke daerah, dimana kewenangan pemungutan dilakukan oleh daerah dalam wilayah kekuasaanya berdasarkan peraturan yang berlaku dan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas Pemerintah Daerah. Unsur-unsur penting yang terdapat didalam pengertian pajak daerah adalah :

- a) Pajak; merupakan sumber-sumber penerimaan daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah, pajak pemerintah pusat yang diserahkan maupun pajak pemerintah pusat yang dibagihasilkan ke daerah.
- b) Daerah; merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- c) Dalam wilayah kekuasaanya; maksudnya pemungutan pajak hanya dapat dilakukan oleh daerah diwilayah administrasi yang dikuasai.

Pajak Daerah mempunyai fungsi ganda (Makmun, 2009), yaitu : pertama, sebagai sumber pendapatan daerah (*budgetary*) untuk mengisi kas daerah guna membiayai pengeluaran-pengeluaran daerah dalam pelaksanaan tugas pemerintah daerah. Kedua, berfungsi sebagai alat pengatur (*regulatory*) dalam artian untuk mengatur perekonomian guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat, mengadakan retribusi pendapatan stabilitas ekonomi.

Jenis Pajak Daerah sebagaimana diatur dalam pasal 2 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, adalah :

a) Jenis Pajak Provinsi terdiri atas :

- 1) Pajak Kendaraan Bermotor;
- 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
- 4) Pajak Air Permukaan; dan
- 5) Pajak Rokok akan dilaksanakan sepenuhnya oleh daerah;

b) Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas :

- 1) Pajak Hotel;
- 2) Pajak Restoran;
- 3) Pajak Hiburan;
- 4) Pajak Reklame;
- 5) Pajak Penerangan Jalan;
- 6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan;
- 7) Pajak Parkir;
- 8) Pajak Air Tanah;
- 9) Pajak Sarang Burung Walet;
- 10) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
- 11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

2) Retribusi Daerah

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 64 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah, yang  
*commit to user*



dimaksud Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Sementara menurut Usman dan Subroto (1980:4) retribusi adalah suatu pungutan yang dilakukan sebagai atau fasilitas yang diberikan dan nyata kepada pembayar. Menurut Wayong (1975:2) retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa yang diberikan oleh daerah baik langsung maupun tidak langsung. Adapun yang dimaksud Retribusi dalam penelitian ini adalah suatu bentuk pungutan yang harus dibayar oleh seseorang karena orang tersebut telah menikmati secara langsung atas fasilitas atau jasa yang disediakan oleh penyedia jasa yang dalam hal ini adalah Pemerintah Kabupaten Ngawi.

Ruang lingkup retribusi sektor pariwisata sebagai obyek penelitian ini meliputi retribusi tempat rekreasi dan retribusi olah raga yang dikelola oleh Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata. Adapun obyek retribusi meliputi tanda masuk perorangan, tanda masuk kendaraan, penggunaan fasilitas tempat rekreasi, tempat parkir khusus di lingkungan tempat rekreasi, penggunaan lapangan olah raga yang terdiri dari lapangan sepak bola, lapangan bola volley, tennis meja, bulu tangkis, penggunaan lapangan untuk pertunjukan, pertunjukan pasar malam, dan penggunaan gedung pertemuan Eko Kapti. Selanjutnya retribusi ijin kios pasar dan retribusi ijin dasaran pasar yang dikelola oleh Badan Penanaman Modal

dan Pelayanan Perijinan. Jenis retribusi sektor pariwisata berikutnya adalah retribusi parkir di tepi jalan umum yang dikelola oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika. Terakhir jenis retribusi pelayanan pasar yang terdiri dari retribusi kios, retribusi los, retribusi tempat dasaran, retribusi pelataran pasar, retribusi kamar mandi/wc, dan retribusi tempat parkir khusus di lingkungan pasar. Sebagai ciri khas atau karakteristik retribusi sebagai berikut :

- a) Adanya pemberian fasilitas atau jasa yang secara langsung dapat dirasakan oleh para pengguna atau pemakai jasa yang disediakan oleh pemerintah secara langsung terhadap konsumennya;
- b) Retribusi hanya dibebankan kepada konsumen pengguna jasa yang disediakan, sedangkan konsumen yang tidak mendapat jasa tersebut juga tidak ada kewajiban membayar retribusi;
- c) Retribusi tersebut selalu berhubungan dengan pelayanan umum yang diberikan pemerintah;

Dengan demikian jelas bahwa retribusi berbeda dengan pajak yang mempunyai karakteristik sebagai berikut (Prakoso: 2003) :

- a) Pembayar pajak atau masyarakat tidak dapat langsung merasakan manfaat dari jasa atau fasilitas yang disediakan oleh pemerintah;
- b) Pajak dibebankan kepada seluruh masyarakat tanpa melihat mendapat manfaat atau tidak terhadap fasilitas atau jasa yang disediakan oleh pemerintah;

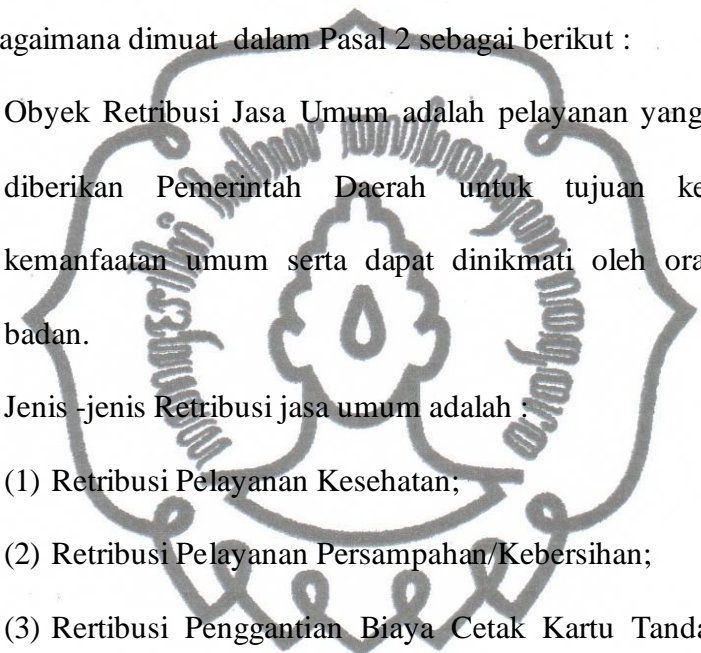
*commit to user*

Berdasarkan sifatnya, ada bermacam-macam retribusi yang diantaranya retribusi yang bersifat umum, artinya bahwa pungutan tersebut mempunyai sifat berlaku secara umum bagi mereka yang ingin menikmati kegunaan dari suatu jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah. Misalnya bagi mereka yang masuk ke dalam pasar untuk berjualan, walaupun hanya sehari tetap dikenakan pungutan retribusi. Selain itu ada retribusi bertujuan, yaitu retribusi yang dilihat dari segi pemakaiannya, pungutan tersebut bertujuan untuk memperoleh jasa, manfaat dan kegunaan dari fasilitas yang disediakan oleh pemerintah daerah. Misalnya kewajiban retribusi yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan Kartu Tanda Penduduk.

Untuk menetapkan kebijaksanaan umum tentang prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi, maka retribusi dibagi menjadi tiga golongan, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Pertama, Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Kedua, Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah menganut prinsip komersil karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Ketiga, Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan oleh pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian

dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah dinyatakan bahwa Retribusi dapat diklasifikasikan sebagaimana dimuat dalam Pasal 2 sebagai berikut :

- 
- a) Obyek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan atau kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- b) Jenis-jenis Retribusi jasa umum adalah :
- (1) Retribusi Pelayanan Kesehatan;
  - (2) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
  - (3) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil;
  - (4) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
  - (5) Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum;
  - (6) Retribusi Pasar;
  - (7) Retribusi Air Bersih;
  - (8) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
  - (9) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
  - (10) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
  - (11) Retribusi Pengujian Kapal Perikanan;

Selanjutnya dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah dicantumkan tentang Retribusi Jasa Usaha sebagai berikut :

- a) Obyek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pelayanan tersebut belum cukup disediakan oleh swasta.
- b) Jenis-jenis Retribusi jasa usaha adalah:
- (1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
  - (2) Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan;
  - (3) Retribusi Terminal;
  - (4) Retribusi Tempat Khusus Parkir;
  - (5) Retribusi Tempat Penitipan Anak;
  - (6) Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
  - (7) Retribusi Penyedotan Kakus;
  - (8) Retribusi Rumah Potong Hewan;
  - (9) Retribusi Tempat Pendaratan kapal;
  - (10)Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga;
  - (11)Retribusi Penyeberangan di atas Air;
  - (12)Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
  - (13)Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah;

Pada pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah dicantumkan tentang Retribusi Perizinan Tertentu dengan perincian sebagai berikut :

*commit to user*

- a) Obyek Retribusi Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
- b) Jenis -jenis Retribusi perizinan tertentu adalah:
- (1) Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah;
  - (2) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
  - (3) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
  - (4) Retribusi Izin Gangguan;
  - (5) Retribusi Izin Trayek;
  - (6) Retribusi Izin Pengambilan Hasil Hutan Ikutan;

Retribusi merupakan iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik langsung dapat ditunjuk. Paksaan disini bersifat ekonomis karena siapa saja tidak merasakan jasa balik dari pemerintah dan ia tidak dikenakan iuran itu Nurlaila ( 2004: 30). Oleh karena itu masalah tarif retribusi ini harus seimbang dengan biaya yang dikeluarkan untuk dapat memelihara kelangsungan jasa itu. Dengan demikian, berarti bukan selalu mencari keuntungan saja, sehingga seperti halnya pajak, maka retribusi akan diperlukan pengesahan terlebih dahulu dari penguasa atau menurut cara-cara yang ditetapkan undang-undang.

- 3) Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- 4) Sumber Pendapatan Asli Daerah selanjutnya adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Dalam hal ini, laba BUMD yang diharapkan sebagai sumber pendapatan bagi daerah. Oleh sebab itu pengelolaan BUMD harus bersifat dan harus berpegang pada prinsip ekonomi secara umum. Sesuai dengan tujuan BUMD, yaitu untuk turut serta dalam melaksanakan pembangunan daerah khususnya dan pembangunan ekonomi nasional umumnya untuk memenuhi kebutuhan rakyat dengan mengutamakan industrialisasi dan ketentuan serta ketenagakerjaan dalam perusahaan, menuju masyarakat adil dan makmur.
- 5) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.  
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Sesuai dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, meliputi :
  - a) Jasa giro;
  - b) Pendapatan bunga;
  - c) Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan
  - d) Komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan atau pengadaan barang dan jasa oleh daerah;

**b. Dana Perimbangan**

Diperoleh dari bagian daerah, penerimaan pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dan penerimaan yang berasal dari sumber daya alam serta dana alokasi umum dan dana alokasi khusus.

**c. Pinjaman Daerah**

Pinjaman pemerintah daerah merupakan pinjaman dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, sehingga saat ini pemerintah daerah belum diijinkan mengajukan pinjaman kepada pihak asing. Pinjaman pemerintah daerah biasanya dilakukan untuk menutupi kekurangan anggaran belanja daerah tetapi dilakukan oleh atau bekerja sama dengan pemerintah pusat.

**d. Lain- lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah**

Pendapatan Asli Daerah sebagai salah satu sumber penerimaan daerah seperti telah di uraikan diatas diupayakan agar selalu mengalami peningkatan, salah satu caranya adalah dengan meningkatkan pendapatan sektor pariwisata di wilayah yang bersangkutan.

Hasil penelitian Roerkgets dan Savat pada tahun 1983 (Soeratno,2008:88) mengemukakan bahwa manfaat yang dapat diberikan sektor pariwisata adalah:

- a. Menambah pemasukan dan pendapatan baik bagi pemerintah daerah maupun masyarakatnya. Peningkatan ini bisa dilihat dari meningkatnya hasil usaha yang dilakukan, misalnya bidang perhotelan, restoran, biro perjalanan, pramu wisata dan barang-barang souvenir bagi Pendapatan Asli Daerah serta sumber pertumbuhan ekonomi secara umum.



- b. Membuka kesempatan kerja bagi penduduk di lokasi pariwisata, baik di sektor formal maupun informal.
- c. Menambah devisa bagi negara.
- d. Merangsang pertumbuhan kebudayaan lokal serta menunjang gerak pembangunan daerah, misalnya: melalui peningkatan infrastruktur, perhotelan, restoran, dan lain-lain sehingga menunjang pembangunan daerah secara keseluruhan.

#### **6. Peran Pemerintah Dalam Pengelolaan Pariwisata**

Pembangunan merupakan upaya yang secara sadar dilaksanakan oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah dalam rangka pencapaian tujuan nasional melalui pertumbuhan dan perubahan secara terencana menuju masyarakat modern. Tidak ada satu negara akan mencapai tujuan nasionalnya tanpa melakukan berbagai jenis kegiatan pembangunan, oleh karena itu proses pembangunan harus terus berlanjut karena tingkat kemakmuran, keadilan dan kesejahteraan rakyat bersifat relatif dan tidak akan pernah dicapai secara absolut.

Melaksanakan tugas pembangunan yang sangat penting dan mulia yang merupakan tanggung jawab seluruh komponen masyarakat dan bukan tugas pemerintah semata, tetapi harus diakui bahwa pemerintah memainkan peranan yang dominan dalam proses Pembangunan Nasional. Peran pemerintah yang dimaksud disini adalah selaku stabilisator, selaku inovator, selaku modernisator atau selaku pelopor. Dan pelaksana sendiri kegiatan pembangunan tertentu (Nurlaila 2004:55).

### a. Peran selaku Stabilisator

Salah satu ciri negara-negara terbelakang dan sedang membangun adalah situasi politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan tidak stabil. Dalam kondisi kehidupan kenegaraan dan masyarakat yang tidak stabil, sukar menghiraukan terselenggaranya berbagai kegiatan pembangunan, sehingga peran yang sangat penting dimainkan oleh pemerintah secara efektif ialah peran selaku stabilisator.

### b. Peran selaku Inovator

Inovasi merupakan salah satu produk dari kreativitas. Inovasi berarti temuan baru, metode baru, sistem baru dan yang terpenting cara berpikir baru. Dengan demikian, dalam peranan selaku inovator, pemerintah harus mejadikan sumber dari ide-ide baru.

Ada 3 (tiga) hal yang mutlak dilakukan oleh pemerintah selaku inovator sebagai berikut:

- 1) Menerapkan inovasi dilingkungan birokrasi pemerintah.

Masyarakat menganggap aparatur pemerintah pada umumnya cara kerjanya lamban, sistem kerja yang berbelit-belit, cara berpikir yang berorientasi kekuasaan. Dan hasilnya tingkat produktivitas kerja yang rendah.

- 2) Inovasi yang sifatnya konseptual. Pemerintah dengan seluruh jajarannya harus merupakan sumber dari ide-ide baru.
- 3) Inovasi sistem, prosedur dan metode kerja.

Pada sektor pariwisata peran pemerintah harus dapat menciptakan obyek wisata yang baru dan mendukung pembangunan pariwisata sehingga potensi wisata sangat bervariasi. Pemerintah memberikan kemudahan dalam pemberian ijin usaha untuk pengembangan obyek wisata sebagai sarana pendukung obyek, daya tarik wisata, penurunan suku bunga dan perpanjangan masa tenggang. Pembayaran kredit bunga bagi yang berusaha dibidang pariwisata serta tarif PLN untuk hotel sama dengan golongan industri.

### c. Peran selaku Modernisator

Melalui pembangunan, setiap negara ingin menjadi negara modern. Berbagai implikasi pernyataan tersebut antara lain adalah kuat, mandiri, diperlakukan sederajat oleh negara-negara lain. Kuat berarti mampu mempertahankan kemerdekaanya dan kedaulatannya dengan tetap menyadari pentingnya bekerja sama dengan negara-negara lain. Sederajat dalam arti perolehan pengakuan. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan antara lain :

- 1) Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- 2) Kemampuan dan kemahiran manajerial;
- 3) Kemampuan mengolah kekayaan alam yang dimiliki sehingga memiliki nilai tambah yang tinggi;
- 4) Sistem pendidikan yang handal yang menghasilkan sumber daya manusia yang produktif;
- 5) Landasan kehidupan politik yang kukuh dan demokratis;
- 6) Memiliki visi yang jelas tentang masa depan yang diinginkan;

- 7) Rakyat yang diberdayakan sehingga mampu mengambil keputusan yang rasional;
- 8) Kesiediaan mengambil resiko;
- 9) Mempunyai orientasi masa depan;
- 10) Bersedia memberikan kesempatan kepada swasta untuk mendirikan lembaga pendidikan dan ketrampilan pariwisata;

#### **d. Peran selaku Pelopor**

Selaku pelopor, aparatur pemerintah harus menjadi panutan bagi seluruh masyarakat, misalnya;

- 1) Kepeloporan dalam bekerja seproduktif mungkin dengan pemanfaatan waktu sebaik-baiknya dengan orientasi yang maksimal;
- 2) Kepeloporan dalam kejujuran;
- 3) Kepeloporan dalam penegakan disiplin;
- 4) Kepeloporan dalam ketaatan perundang-undangan;
- 5) Kepeloporan kesediaan berkorban demi kepentingan negara;
- 6) Kepeloporan dalam kepedulian pelestarian lingkungan;
- 7) Kepeloporan dalam penerapan obyektifitas;
- 8) Kepeloporan dalam penerapan efisiensi;
- 9) Kepeloporan dalam peningkatan pengetahuan dan ketrampilan;

Pada sektor pariwisata pemerintah memberikan kebijakan pada jangka waktu liburan nasional sehingga masyarakat mempunyai kesempatan untuk berwisata, mengeluarkan Undang-undang kepariwisataan dan mendukung peningkatan masyarakat dalam menggali dan melestarikan nilai-nilai luhur

budaya daerah, dan peningkatan promosi dan pemasarannya baik didalam maupun diluar negeri dengan memanfaatkan kerja sama kepariwisataan regional secara optimal dalam bentuk paket-paket wisata.

#### **e. Peran selaku Pelaksana Sendiri**

Meskipun benar bahwa pelaksanaan berbagai kegiatan pembangunan merupakan tanggung jawab nasional dan bukan menjadi beban pemerintah semata-mata karena berbagai pertimbangan, seperti keselamatan negara, modal yang terbatas, kemampuan yang masih belum memadai karena tidak diminati oleh masyarakat dan karena secara konstitusional merupakan tugas pemerintah, sangat mungkin terdapat berbagai kegiatan yang tidak bisa diserahkan kepada pihak swasta melainkan harus diselenggarakan sendiri oleh pemerintah.

Namun sebagai industri perdagangan jasa kegiatan pariwisata tidak terlepas dari peran serta pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pemerintah bertanggung jawab empat hal utama yaitu: perencanaan (*Planning*) daerah atau kawasan pariwisata, pembangunan (*development*) fasilitas utama dan pendukung pariwisata, pengeluaran kebijakan (*policy*) pariwisata, dan pembuatan serta penegakan peraturan (*regulation*). Menurut Subadra (2001) mengenai peran-peran pemerintah dalam bidang pariwisata adalah sebagai berikut :

##### 1) Perencanaan Pariwisata

Pariwisata merupakan industri yang memiliki kriteria-kriteria khusus, mengakibatkan dampak positif dan negatif. Untuk memenuhi

*commit to user*

kriteria khusus tersebut, memaksimalkan dampak positif dan meminimalkan dampak negatif yang ditimbulkan sehubungan dengan pengembangan pariwisata, diperlukan perencanaan pariwisata yang matang. Kesalahan dalam perencanaan akan mengakibatkan munculnya berbagai macam permasalahan dan konflik kepentingan diantara para Stakeholders. Masing-masing daerah tujuan wisata memiliki permasalahan yang berbeda dan memerlukan jalan keluar yang berbeda pula. Dalam pariwisata, perencanaan bertujuan untuk mencapai cita-cita atau tujuan pengembangan pariwisata. Secara garis besar perencanaan pariwisata mencakup beberapa hal penting yaitu: (1) perencanaan pembangunan ekonomi yang bertujuan untuk memacu pertumbuhan berbagai industri yang berkaitan dengan pariwisata; (2) perencanaan penggunaan lahan; (3) perencanaan infrastruktur yang berhubungan dengan jalan, bandar udara dan keperluan lainnya seperti: listrik, air, pembuangan sampah dan lain-lain; (4) perencanaan pelayanan sosial yang berhubungan dengan penyediaan lapangan pekerjaan, pelayanan kesehatan, pelayanan kesehatan dan kesejahteraan sosial; dan (5) perencanaan yang mencakup keamanan internal untuk daerah tujuan wisata dan para wisatawan.

## 2) Pembangunan Pariwisata

Pembangunan pariwisata umumnya dilakukan oleh sektor swasta terutama fasilitas dan jasa pariwisata. Namun, pengadaan infrastruktur umum seperti jalan, listrik dan air yang berhubungan dengan pengembangan pariwisata terutama untuk proyek-proyek yang berskala

besar yang memerlukan dana yang sangat besar seperti pembangunan bandar udara, jalan untuk transportasi darat, proyek penyediaan air bersih, dan proyek pembuangan limbah merupakan tanggung jawab pemerintah, selain itu pemerintah juga berperan sebagai penjamin dan pengawas para investor yang menanamkan modalnya dalam bidang pembangunan pariwisata.

### 3) Kebijakan Pariwisata

Kebijakan merupakan jangka panjang yang mencakup tujuan pembangunan pariwisata atau prosedur pencapaian tujuan tersebut dalam pernyataan formal seperti hukum dan dokumen-dokumen resmi lainnya. Kebijakan yang dibuat pemerintah harus sepenuhnya dijadikan panduan dan ditaati oleh para *steckholder*. Kebijakan-kebijakan yang harus dibuat dalam pariwisata adalah kebijakan yang berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesempatan kerja, dan hubungan politik terutama politik luar negeri bagi daerah tujuan wisata yang mengandalkan wisatawan manca negara. Umumnya kebijakan pariwisata dimasukkan dalam kebijakan ekonomi secara keseluruhan yang kebijakannya mencakup struktur dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Kebijakan ekonomi yang harus dibuat sehubungan dengan pembangunan pariwisata adalah kebijakan mengenai ketenagakerjaan, penanaman modal dan keuangan, industri penting yang mendukung kegiatan pariwisata, dan perdagangan barang dan jasa.

#### 4) Peraturan Pariwisata

Peraturan pemerintah memiliki peran yang sangat penting terutama dalam melindungi wisatawan dan memperkaya atau mempertinggi pengalaman perjalanannya. Peraturan-peraturan penting yang harus dibuat pemerintah untuk kepentingan tersebut adalah: (1) peraturan perlindungan bagi wisatawan terutama bagi biro perjalanan wisata yang mengharuskan wisatawan membayar uang muka (*deposit payment*) sebagai jaminan pemesanan jasa seperti akomodasi, dan lain-lain; (2) peraturan keamanan kebakaran yang mencakup pengaturan mengenai jumlah minimal lampu yang ada di masing-masing lantai hotel dan alat pendukung keselamatan lainnya; (3) peraturan keamanan makan dan kesehatan yang mengatur mengenai standar kesehatan makanan yang disuguhkan kepada wisatawan; (4) peraturan standar kompetensi pekerja-pekerja yang membutuhkan pengetahuan dan keahlian khusus seperti pilot, sopir dan nahkoda.

## 7. Permintaan dan Penawaran Pariwisata

### a. Permintaan pariwisata

Menurut Spillane (2001:103), salah satu faktor yang sangat mempengaruhi permintaan akan pariwisata adalah mobilitas. Mobilitas manusia timbul atas berbagai macam dorongan kebutuhan atau kepentingan yang disebut dengan istilah motivasi, yang dapat digolongkan sebagai berikut:

- 1) Dorongan kebutuhan dagang atau ekonomi;
  - 2) Dorongan kebutuhan kepentingan politik;
- commit to user*



- 3) Dorongan kebutuhan keamanan;
- 4) Dorongan kebutuhan kesehatan;
- 5) Dorongan kebutuhan pemukiman;
- 6) Dorongan kebutuhan kepentingan keagamaan;
- 7) Dorongan kebutuhan kepentingan pendidikan atau studi;
- 8) Dorongan kebutuhan minat kebudayaan;
- 9) Dorongan kebutuhan hubungan keluarga;
- 10) Dorongan kebutuhan untuk rekreasi (dalam arti luas);

Motivasi-motivasi tersebut timbul dari kepentingan-kepentingan hidup manusia. Oleh karena kehidupannya dalam masyarakat wajar maka aktivitas-aktivitas permintaan timbul layak untuk dipenuhi dan disediakan. Permintaan dalam pariwisata dapat berupa pemandangan yang indah, udara yang segar, langit yang cerah, pantai yang bersih dan sebagainya. Permintaan tersebut pada dasarnya terbagi atas dua yaitu permintaan yang potensial dan permintaan yang nyata. Permintaan yang potensial adalah sejumlah orang yang memenuhi anasir-anasir pokok suatu perjalanan karena itu mereka berada dalam kondisi siap untuk bepergian, sedangkan permintaan yang nyata (*actual*) adalah orang-orang yang secara nyata bepergian kesuatu daerah tujuan wisata. Perbedaan jumlah permintaan potensial dan aktual merupakan kancah usaha bagi orang-orang pemasaran (Gromang, 2003:132).

Beberapa faktor penting yang mempengaruhi perkembangan permintaan pariwisata yaitu antara lain pendapatan, dimana pendapatan seseorang sangat menentukan dapat tidaknya seseorang berwisata karena apabila memiliki uang

lebih maka seseorang baru akan melakukan perjalanan wisata. Selain itu faktor yang lain yaitu perubahan harga akan mempengaruhi penggunaan dana yang dimiliki seseorang, kualitas dalam hal yang dapat dilihat, digunakan dan dapat dibeli di daerah tujuan wisata, faktor hari libur juga memberikan pengaruh positif bagi terselenggaranya perjalanan wisata, transportasi yang canggih dapat mempersingkat waktu perjalanan dengan segala fasilitas yang nyaman dan baik.

#### **b. Penawaran pariwisata**

Sejak kepariwisataan menjadi industri yang populer terutama karena ekonomisnya, praktis setiap negara berminat mengembangkan dirinya sebagai salah satu tujuan wisata. Keadaan alam dan masyarakat negara-negara berkembang menjadi andil utama untuk diminati dan menjadi daya tarik yang kuat di pasaran wisata dunia. Namun demikian, secara absolut sebagian wisatawan senantiasa bertukar kunjung ke negara tetangga yang sudah maju, dikarenakan banyaknya hari-hari luang untuk berkunjung dan arena secara relative biaya transport yang semakin mahal ke negara-negara tujuan yang semakin jauh. Persaingan di antara sesama negara destinasi menjadi semakin tajam dan satu-satunya harapan pertumbuhan suatu negara tujuan wisata terletak pada persiapan apa yang ditawarkan itu supaya memadai dengan permintaan. Ini adalah proses berkesinambungan, yang tergantung pada hasil studi mendalam mengenai permintaan dan analisis produk, tempat kedua unsur ini merupakan unsur pokok perencanaan penawaran (Gromang, 2003:112).

Namun saat ini sebagian lembaga atau instansi telah menetapkan lima hari kerja dalam seminggu. Disamping itu pemerintah mengambil kebijakan yang

memungkinkan memindahkan libur nasional ke awal atau akhir pekan. Kondisi ini akan menambah jumlah waktu luang bagi para pekerja. Waktu luang tersebut merupakan syarat bagi seseorang untuk melakukan perjalanan wisata, sebab banyak orang yang memiliki uang yang cukup, akan tetapi waktu luangnya sangat terbatas sehingga tidak dapat melakukan perjalanan wisata. Dengan kata lain kondisi ini merupakan peluang bagi pemasaran untuk dapat merubah wisatawan potensial menjadi wisatawan aktual. Jadi paling tidak saat ini pariwisata nasional dapat memanfaatkan kondisi diatas, yaitu dengan melayani wisatawan nusantara yang membatalkan perjalanan keluar negeri, dan mereka yang waktu luangnya meningkat agar dimanfaatkan untuk kegiatan wisata.

Penawaran pariwisata diharapkan dapat menyumbang sejumlah uang antara lain dari pengeluaran wisatawan asing, transportasi, pengembalian modal dari investasi pariwisata di luar negeri, pengiriman uang oleh pekerja bidang pariwisata di luar negeri dan sebagainya. Hal ini memberikan kontribusi positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Karena industri pariwisata pada umumnya berorientasi pada penjualan jasa, dimana salah satu sifat dari produksi jasa dihasilkan melalui padat karya, maka dengan berkembangnya pariwisata akan membuka banyak kesempatan kerja. Akibat langsung terhadap kesempatan kerja ini terutama akan sangat dirasakan oleh negara-negara berkembang yang umumnya aktivitas ekonominya masih terbatas. Sebagai contoh yaitu Bali merupakan daerah yang pariwisatanya berkembang cukup pesat sehingga sektor pariwisata mampu lapangan kerja seper tiga dari penduduknya yang berjumlah 3,5 juta orang (Lin, 2003).

## 8. Keterkaitan Industri Pariwisata dan Pertumbuhan Ekonomi

Pengembangan pariwisata dianggap penting oleh pemerintah, mengingat Indonesia sebagai negara berkembang sehingga praktis sektor industri pariwisata belum begitu menonjol. Untuk itu sumber pertumbuhan nasional yang dimiliki mungkin bisa dianggap dominan adalah kepariwisataan (keindahan, kekayaan alam, peninggalan sejarah, budaya dan adat istiadat tradisional). Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1993, telah menetapkan tujuan-tujuan dalam sektor pariwisata sebagai berikut:

- a. Menjadikan kepariwisataan sebagai sektor andalan guna menggerakkan kegiatan ekonomi;
- b. Memperbesar penerimaan devisa;
- c. Memperluas dan pemeratakan kesempatan usaha dan memperluas lowongan pekerjaan terutama bagi masyarakat setempat;
- d. Mendorong pertumbuhan ekonomi daerah;

Dari sudut pembangunan negara, pariwisata merupakan bagian yang integral dari pembangunan nasional. Pariwisata mempunyai manfaat dan peranan sebagai berikut:

- a. Peranan pariwisata dalam bidang ideologi sebagai wahana efektif untuk menanamkan jiwa semangat dan nilai-nilai luhur kebudayaan nasional.
- b. Manfaat wisata dalam bidang politik, dengan dibangunnya obyek wisata yang tersebar diseluruh nusantara dan penyebaran kegiatan berwisata ke berbagai daerah akan menambah kecintaan dan rasa bangga terhadap semua kekayaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, manfaat pariwisata dalam bidang

ekonomi, akan meningkatkan penerimaan devisa negara dan penerimaan negara yang berupa :

- 1) Pajak langsung (pajak penghasilan maupun pajak atas penggunaan fasilitas yang terkait dengan pariwisata), pajak tak langsung (bea masuk dan cukai yang diterima negara dan yang diterima dari sektor pariwisata maupun yang terkait);
- 2) Meningkatkan dan pemeratakan pendapatan masyarakat, melalui *multiplier effect* dari industri pariwisata;
- 3) Meningkatkan pembangunan daerah;
- 4) Manfaat pariwisata dalam bidang sosial dan budaya. Turut berupaya dalam peningkatan obyek-obyek wisata, pertumbuhan perkumpulan seni dan budaya, pertumbuhan hasil kerajinan dan pelestarian peninggalan sejarah.

## B. Kajian Empiris

Sebagai kerangka acuan untuk mempermudah berpikir, baik akademis maupun rasional tidak lepas dari hasil penelitian terdahulu, yang berkaitan dengan perkembangan sektor pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Soeroso (2007) dalam penelitian dengan tujuan yang ingin dicapai adalah pembangunan fisik diutamakan sedangkan kultur masyarakat lokal dinafikan, mereka tidak berdaya, merasa tercabut dari habitatnya tanpa dapat mengakses pasar didepan rumahnya, tetap miskin, perkembangan sedikit sama dengan tiga dasawarsa yang. Orientasi pengelolaanya kuantitas dan Cartesian; memisahkan kepentingan manusia dan alam sehingga menciptakan

*commit to user*

*normative market failure* dengan membuat kesalahan keputusan dan atribut kultural pada *market outcome* atau *market process*. Bila tidak dieliminasi, akan mengganggu eksistensi situs serta menurunnya kualitas lingkungan terutama saujana budaya. Dari isu tersebut muncul persepsi, pengembangan dan konservasi pusaka dunia perlu mengikutsertakan keseimbangan lingkungan biogesik dan kultural. Manfaat yang diberikan Borobudur bukan semata hanya rekreasi di situs candi secara aktif. Namun, secara pasif juga dalam bentuk utilitas ekosistem, pemandangan yang istimewa beserta budaya manusia yang mengisinya, sebagai penyangga kelestarian dalam jangka panjang.

Penelitian yang dilakukan oleh Bursan (2006). Analisis terhadap karakteristik responden dilakukan terpisah antara wisatawan asing dan wisatawan domestik, mengingat wisatawan domestik sifatnya lebih homogen jika dilihat dari asal Negeranya. Secara umum wisatawan asing yang berkunjung ke Lampung berasal dari berbagai Negara antar lain: China, Amerika Serikat, Singapore, Hongkong, Thailand, Malaysia dan beberapa Negara dari benua Eropah lainnya. Keadaan ini mengindikasikan cukup dikenalnya Propinsi Lampung sebagai tujuan wisata oleh berbagai wisatawan dunia.

Wisatawan asing yang berkunjung ke Lampung secara umum memiliki 3 tujuan, yaitu: bisnis, berlibur dan pendidikan. Tujuan untuk berlibur mendominasi motif untuk berkunjung sebesar 83%, motif bisnis sebesar 14% dan pendidikan sebesar 3%. Jumlah wisatawan asing yang terbanyak mengunjungi daerah Lampung berasal dari Singapore sebanyak 13% dengan motif bisnis. Ini sejalan dengan banyaknya bisnis hasil bumi Propinsi Lampung seperti: kopi, lada, tapioka

yang diekspor melalui Singapore. Motif pendidikan terdapat 3% dengan Negara asal Australia dan China. Khusus untuk 2 wisatawan China mereka menjadi volunteer emengajar bahasa Cina di Universitas Lampung. Sedangkan 1 orang wisatawan yang berasal dari Australia merupakan pertukaran pelajar antara Indonesia dan Australia.

Penelitian yang dilakukan oleh Sujali (1996). Kabupaten Klaten mempunyai potensi obyek wisata yang dapat digunakan sebagai modal awal pariwisata daerah dapat menjadi tujuan rekreasi dan mencari hiburan bagi masyarakat disekitarnya. Orientasi pengunjung atau wisatawan cenderung kearah wisata hiburan, dan hiburan yang ada adalah berupa acara kegiatan tradisional seperti maleman, Syawalan, Muludan dan lain-lain. Kabupaten Klaten mengutamakan pengembangan pariwisata lokal. Perkembangan obyek wisata secara tidak langsung dapat memberikan alternatif atau kesempatan untuk membuka lapangan kerja alternatif, lapangan kerja baru seperti membuka warung, penitipan sepeda, bengkel sepeda atau yang lain.

Pertumbuhan pengunjung dan pendapatan dari usaha pariwisata menunjukkan adanya peningkatan dari tahun ke tahun. Ini berarti bahwa masih kecil/rendah peran usaha pariwisata terhadap pendapatan daerah sudah menampak. Untuk meningkatkan peran serta dari sektor pariwisata daerah, peneliti melihat hal-hal yang dapat diusulkan peningkatan peran serta kepariwisataan daerah melalui Dinas Pariwisata yakni memberikan kesempatan lebih luas bagi peran Dinas Pariwisata Daerah yang mengelola kepariwisataan mulai dari menggali potensi, membangun, mengelola sampai pada menerima

hasilnya dan meningkatkan perangkat/pelaksana dalam bentuk ketrampilan dan kemampuan pembangunan khususnya pembangunan obyek wisata dan usaha wisata.

Penelitian yang dilakukan oleh Trisnawati, Wiyadi dan Priyono (2006). Penelitian ini melakukan penghitungan index daya saing pariwisata dengan memasukkan seluruh indikator daya saing dari WWTC sebanyak 8 indikator dan mengkhususkan pada destinasi Surakarta. Pemilihan destinasi tersebut dengan alasan bahwa pada tahun 2006 daerah tersebut memiliki bandara internasional. Selain itu penelitian ini juga membandingkan daya saing destinasi tersebut dengan daerah Yogyakarta yang merupakan *benchmark* daerah wisata di Indonesia. Analisis penentuan daya saing ini penting dilakukan untuk memberikan gambaran posisi daya saing pariwisata di daerah Surakarta dan perbandingan daya saing daerah tersebut dengan daerah Yogyakarta.

Hasil analisis ini memberi implikasi pada kebijakan yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah Kota Surakarta untuk mengembangkan sektor pariwisata karena dengan memperhatikan indikator-indikator penentu daya saing. Hal ini penting dilakukan karena dengan memperhatikan indikator-indikator penentu daya saing pariwisata dapat dikaji kelebihan dan kekurangan daerah tersebut dalam mengembangkan industri pariwisata sebagai salah satu sumber PAD yang potensial, apalagi bandara Adisumarmo (Solo) sudah menjadi bandara internasional. Tujuan penelitian ini adalah mengukur daya saing industri pariwisata di Surakarta yang merupakan jendela wisata di Jawa Tengah, menentukan posisi daya saing industri pariwisata Surakarta dibandingkan dengan



Yogyakarta sebagai analisis pembandingan dalam lingkup kajian ini. Disamping itu juga mendeskripsikan sumbangan industri ini terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta menganalisis faktor-faktor yang dapat meningkatkan daya saing industri pariwisata di kawasan ini. Manfaat yang diharapkan dari penelitian mengenai daya saing pariwisata ini adalah dapat memberi gambaran posisi daya saing pariwisata di Surakarta dan perbandingan daya saing daerah tersebut dengan daerah Yogyakarta.

Disamping itu hasil analisis ini diharapkan dapat memberi implikasi pada kebijakan yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah Kota Surakarta untuk mengembangkan sektor pariwisata dengan memperhatikan indikator-indikator penentu daya saing. Hal ini penting dilakukan karena dengan memperhatikan indikator-indikator penentu daya saing pariwisata dapat dikaji kelebihan dan kekurangan daerah tersebut dalam mengembangkan industri pariwisata sebagai salah satu sumber PAD yang potensial. Desain penelitian ini adalah *exploratory research* dengan melakukan pengukuran daya saing industri pariwisata di Surakarta. Selanjutnya dilakukan analisis perbandingan daya saing industri pariwisata daerah kajian dengan Yogyakarta sebagai benchmark. Periode waktu analisis adalah Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2007.

Dipilihnya periode tersebut karena Tahun 2005, Surakarta belum menjadi bandara internasional dan Tahun 2006 sudah menjadi bandara internasional sehingga perbandingan antara periode sebelum dan sesudah dapat memberikan gambaran lebih lengkap mengenai keadaan pariwisata di kawasan tersebut. Obyek penelitian adalah Kota Surakarta dengan daerah Yogyakarta sebagai analisis

pembandingan. Penelitian menggunakan data sekunder yang bersumber dari Dinas Pariwisata, Biro Pusat Statistik Daerah, bagian perekonomian daerah dan dinas-dinas lain yang terkait. Data primer diperlukan jika data sekunder untuk pengukuran indikator daya saing tidak diperoleh. Data ini bersumber dari hotel, restaurant dan biro travel maupun dari turis yang datang ke kota Surakarta. Data ini diperlukan untuk mengeksplorasi faktor-faktor yang menjadi keunggulan atau kelemahan industri pariwisata di Surakarta.

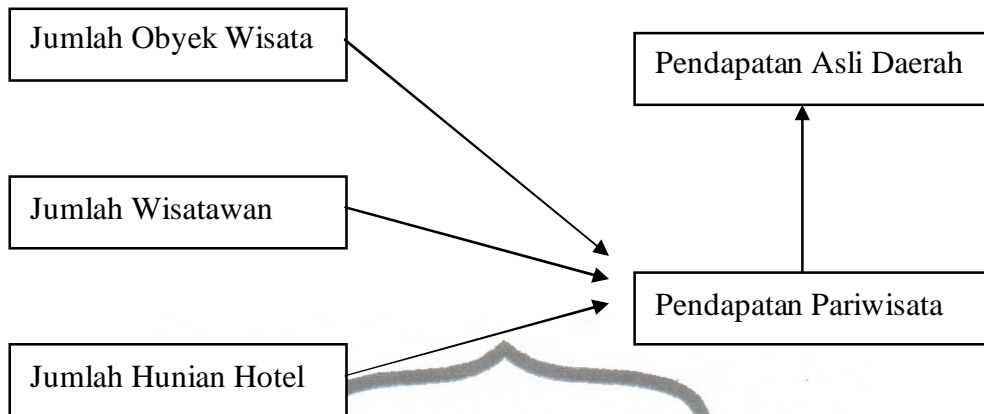
Penelitian yang dilakukan Ratrisari, Dinardani, Wahyono dan Hadi (2002). Berkembangnya pembangunan sektor pariwisata di suatu Negara atau Daerah akan membawa dampak positif dalam meningkatnya perekonomian tersebut, yang salah satu indikatornya adalah murni Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dari hasil analisis yang dilakukan bahwa kontribusi pajak dan retribusi pariwisata di Yogyakarta masih kecil yaitu rata-rata setiap tahunnya sebesar 15,2% dengan porsi pajak terbesar berasal dari pajak Hotel dan Restoran.

Faktor penghambat yang ditemui dan meningkatkan kontribusi sektor pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah ini masih ada beberapa obyek wisata potensial yang belum memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah karena status kepemilikannya bukan oleh pemerintah daerah Kota Yogyakarta. Temuan analisis ini selanjutnya digunakan untuk menyusun rekomendasi mengenai upaya peningkatan kontribusi dari pengembangan obyek-obyek wisata terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta.

Penelitian yang dilakukan oleh Gunarto (2009). Destinasi pariwisata merupakan unsur penting dalam pengembangan kepariwisataan yang berperan penting sebagai penentu dan penggerak utama keputusan wisatawan untuk berwisata. Destinasi pariwisata merupakan rangkaian komponen produk pariwisata yang berada dalam satu satuan spasial/wilayah tertentu. Keseluruhannya membentuk karakter yang menjadi komponen penting dalam pengembangan suatu daerah wisata. Pengembangan destinasi pariwisata seyogyanya mampu mengakomodir dan mengoptimalkan sumber daya budaya dan alam yang ada sehingga dapat memberikan nilai manfaat bagi masyarakat dan wisatawan. Dalam konteks ini, destinasi pariwisata semestinya dikembangkan dengan cara-cara inovatif, kreatif, profesional, terpadu, baik secara sektoral maupun kewilayahan, dan sistematis sehingga menghasilkan sistem penyediaan jasa, infrastruktur dan layanan serta strategi pemasaran yang handal dan tepat.

### **C. Kerangka Pemikiran**

Variabel-variabel yang digunakan dalam pemikiran penelitian “Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Ngawi” adalah variabel pendapatan sektor pariwisata, variabel kontribusi sektor pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah. Berikut ini skema kerangka Pemikiran untuk mengetahui potensi wisata yaitu :

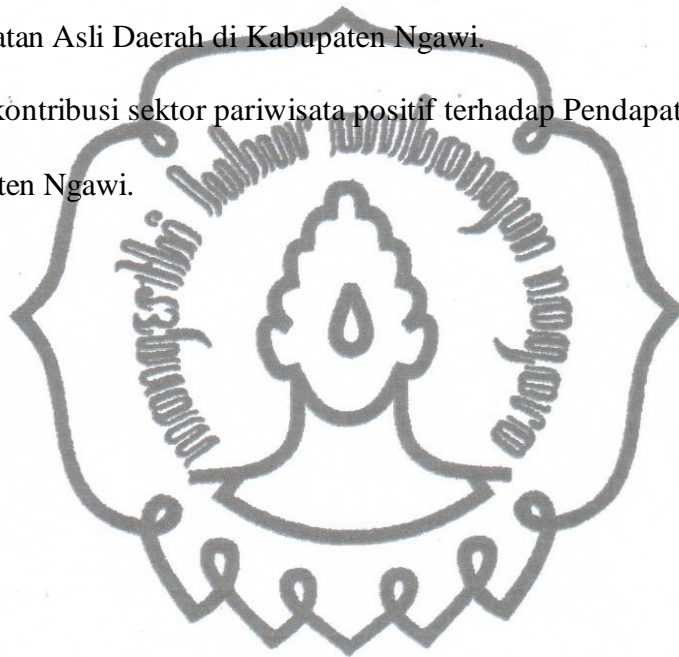


**Gambar : 2.2**  
Kerangka Pemikiran

#### D. Hipotesis

Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Diduga perkembangan pendapatan sektor pariwisata positif terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Ngawi.
2. Diduga kontribusi sektor pariwisata positif terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Ngawi.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Tipe Penelitian**

Penelitian ini merupakan analisis data sekunder mengenai kontribusi sektor pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Ngawi Tahun 2003-2010.

#### **B. Jenis Data dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data *time series* selama Tahun 2003-2010. Sumber data diperoleh dari Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Ngawi yang diambil dari data APBD. Data lainnya diambil dari Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Ngawi, Badan Pusat Statistik (BPS), artikel di internet, buku-buku serta majalah, jurnal dan laporan tertulis lainnya.

#### **C. Definisi Operasional Variabel**

##### **1. Pendapatan Sektor Pariwisata**

Pendapatan dari sektor pariwisata yang termasuk dalam penerimaan daerah Tahun 2003-2010 diantaranya adalah retribusi tempat rekreasi dan olahraga, pendapatan lain-lain yang sah yang diukur dengan satuan rupiah.

## 2. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diterima dari potensi daerah yang berupa pajak milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah juga pendapatan daerah yang sah, yang diukur dengan satuan rupiah

### D. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi analisis kuantitatif, langkah-langkah sebagai berikut:

#### 1. Uji Hipotesis I

Untuk mengetahui perkembangan sumbangan sektor pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah, akan digunakan analisis trend dengan rumus sebagai berikut:

$$Y_o = a + b X$$

Keterangan :

$Y_o$  = Jumlah penerimaan pendapatan pariwisata di Kabupaten Ngawi

$a$  = Konstanta

$b$  = Besar perubahan variabel  $Y$  yang terjadi pada setiap perubahan 1 unit variabel  $X$

$X$  = Tahun

Untuk mencari koefisien  $a$  dan  $b$  digunakan rumus :

$$a = \frac{\sum Y}{N} \quad N = \text{Jumlah Data} \quad b = \frac{\sum XY}{\sum X^2}$$

Penggunaan model trend linear ini bertujuan untuk melihat perkembangan pendapatan sektor pariwisata. *commit to user*

- a. Bila  $b < 0$ , maka perkembangan pendapatan sektor pariwisata menurun.
- b. Bila  $b > 0$ , maka perkembangan pendapatan sektor pariwisata meningkat.

## 2. Uji Hipotesis II

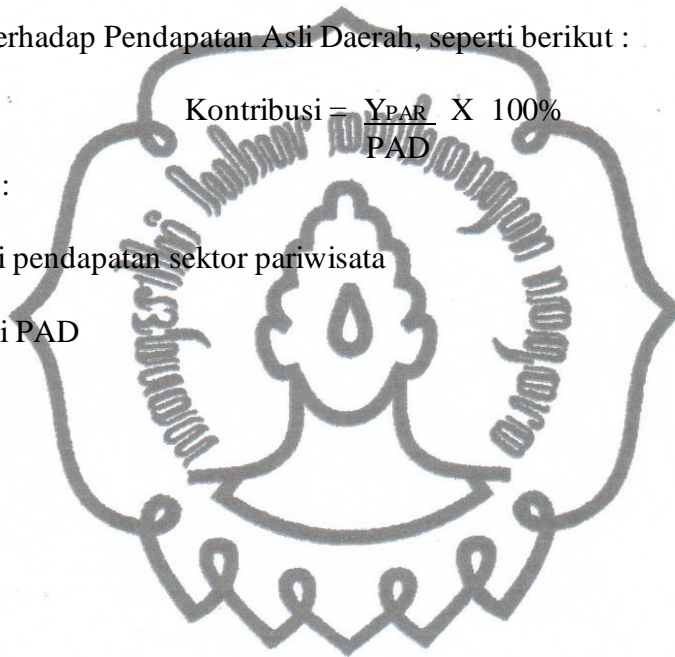
Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat diberikan sektor pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah, seperti berikut :

$$\text{Kontribusi} = \frac{Y_{\text{PAR}}}{\text{PAD}} \times 100\%$$

Keterangan :

$Y_{\text{PAR}}$  = Nilai pendapatan sektor pariwisata

PAD = Nilai PAD





## BAB IV

### ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

#### A. Profil Kabupaten Ngawi

##### 1. Geografis

Profil Kabupaten Ngawi mengenai letak geografis dapat dilihat gambar peta dibawah ini :



**Gambar 4.1**  
Profil Kabupaten Ngawi

Kabupaten Ngawi terletak di wilayah barat Propinsi Jawa Timur yang berbatasan langsung dengan Propinsi Jawa Tengah. Luas wilayah keseluruhan 1.298,58 km<sup>2</sup>, di mana sekitar 39 persen atau sekitar 504,8 km<sup>2</sup> berupa lahan sawah. Kabupaten Ngawi secara administratif kewilayahan terbagi ke dalam 19 kecamatan, terdiri dari 213 Desa dan 4 Kelurahan. Sebagian besar wilayah Kabupaten Ngawi memiliki topografi datar sampai landai, hanya sebagian kecil di lereng Gunung Lawu yang memiliki topografi berbukit-bukit dan curam. Tercatat

ada empat Kecamatan yaitu Sine, Ngrambe, Jogorogo, dan Kendal Wilayah kemiringan 0 – 15 % 118.791 Ha (91,67 %), kemiringan 15 – 40 % : 4.307 Ha (3,32 %), kemiringan di atas 40 % : 6.500 Ha ( 5,01 %). Luas wilayah keseluruhan 1.298,58 km<sup>2</sup>, di mana sekitar 39 persen atau sekitar 504,8 km<sup>2</sup> berupa lahan sawah.

Kabupaten Ngawi dialiri 2 (dua) sungai besar yaitu Bengawan Solo dan sungai Madiun yang menjadi satu mengalir ke utara, memasuki Kabupaten Bojonegoro. Dengan melihat aliran sungai yang ada serta pengaruh dari gunung Lawu, maka Kabupaten Ngawi merupakan daerah yang subur. Ngawi yang merupakan lumbung pangannya propinsi Jawa Timur ini memiliki jajanan atau makanan khas yang terkenal kelezatannya yaitu Kripik tempe yang sentra industri-nya terdapat di desa Karang Tengah Prandon. Selain itu terdapat pula jajanan khas yaitu ledre yang sentra industri-nya berada di wilayah Kelurahan Ketanggi, Kecamatan Ngawi. Berbagai produk kerajinan yang bertaraf lokal maupun ekspor juga banyak dihasilkan di Kabupaten Ngawi, misalnya meubel, ukir kayu jati gempol, anyaman bambu, tenun tikar mendong, dan lain-lain.

Beberapa macam seni budaya tradisional Ngawi masih dipelihara dan hidup berkembang dengan baik. Seperti seni tari orek-orek, bukinol gaple, campursari, wayang kulit, ketoprak, dan sebagainya. Seperti halnya umumnya daerah–daerah lain di Indonesia, di Kabupaten Ngawi juga banyak memiliki tempat wisata yang bernuansa sejarah. Misalnya Museum Trinil, Monumen Suryo, Benteng Van Den Bosch, Pesanggrahan Srigati. Di samping itu, Ngawi juga memiliki tempat wisata yang bernuansakan keindahan alam misalnya Waduk

Pondok, Air Terjun Srambang, Kompleks Perkebunan Teh Jamus dan Taman Pemandian Tawun. Banyaknya tempat pariwisata di kabupaten Ngawi ini juga ditunjang oleh berbagai sarana fasilitas tambahan misalnya hotel dan restoran atau rumah makan. Berikut data mengenai fasilitas Hotel maupun Restoran yang ada di Kota Ngawi baik skala kecil maupun menengah:

## 2. Jumlah Penduduk Kabupaten Ngawi

Jumlah Penduduk Kabupaten Ngawi dapat dilihat tabel dibawah ini

**Tabel 4.1. Jumlah Penduduk Kabupaten Ngawi Tahun 2010**

No	Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Rasio(%)
1	Sine	22601	25580	48181	88,35
2	Ngrambe	21163	21412	42575	98,84
3	Jogorogo	20176	21183	41359	95,25
4	Kendal	24413	26419	50832	92,57
5	Geneng	27717	28118	55835	98,57
6	Gerih	18184	19289	37473	94,27
7	Kwadungan	14199	14483	28682	98,04
8	Pangkur	13996	14631	28627	95,66
9	Karangjati	23211	24825	48036	93,50
10	Bringin	15890	16344	32234	97,22
11	Padas	16911	16949	33860	99,78
12	Kasreman	12013	12006	24019	100,06
13	Ngawi	41930	42432	84362	98,82
14	Paron	44066	45300	89366	97,28
15	Kedunggalar	36901	37212	74113	99,16
16	Pitu	14060	14180	28240	99,15
17	Widodaren	35096	35788	70883	98,06
18	Mantingan	19855	22023	41878	90,16
19	Karanganyar	15842	15654	31496	101,20
	Jumlah	438223	453828	892051	96,56

Sumber : BPS Kabupaten Ngawi, 2010

Jumlah penduduk Kabupaten Ngawi mendasar Ngawi dalam Angka pada akhir Tahun 2010 adalah 892.051 jiwa, terdiri dari 438.223 penduduk laki-laki dan 453.828 penduduk perempuan, dengan jenis kelamin/sex ratio sebesar 96,56%

artinya bahwa setiap 100 penduduk wanita terdapat sekitar 96 penduduk laki-laki. Apabila dibandingkan dengan Tahun 2009 jumlah penduduk Kabupaten Ngawi bertambah sebesar 2.827 jiwa atau meningkat sebesar 0,32% selama setahun. Kecamatan dengan jumlah penduduk terbesar adalah Paron dengan 89.366 jiwa, sedangkan kecamatan dengan jumlah penduduk terkecil adalah Kecamatan Kasreman yaitu 24.019 jiwa. Kepadatan penduduk menunjukkan rasio antara jumlah penduduk dengan luas wilayah. Tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Ngawi Tahun 2010 adalah 688 jiwa/km<sup>2</sup>, naik sekitar 5 jiwa untuk setiap kilometer persegi dari Tahun sebelumnya. Tingkat kepadatan per kecamatan tertinggi di Kecamatan Ngawi (1.196 jiwa/km<sup>2</sup>) dan tingkat kepadatan terendah adalah Kecamatan Karanganyar (228 jiwa/km<sup>2</sup>)

### 3. Industri Perdagangan dan Pariwisata Kabupaten Ngawi

Industri Perdagangan dan Pariwisata Kabupaten Ngawi dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 4.2. Industri Perdagangan dan Pariwisata Kabupaten Ngawi Tahun 2010**

No.	Jenis Industri	Jumlah	Prosentase
1.	Industri makanan dan minumam	1.626	11.07%
2.	Industri tekstil, pakaian jadi dan kerajinan kulit	315	2.15%
3.	Barang dari kayu dan sejenisnya	8.510	57.95%
4.	Kertas dan barang cetakan	28	0.19%
5.	Barang dari karet dan plastik	8	0.05%
6.	Industri logam dasar, besi dan baja	317	2.16%
7.	Industri pengolahan logam	1.405	9.57%
8.	Industri barang galian bukan logam	2.476	16.86%
	Jumlah	14.685	100%

Sumber : Disperindag Kabupaten Ngawi, 2010

Jika dilihat dari jumlah industri perdagangan dan pariwisata di atas, maka dapat memberi gambaran bahwa potensi industri yang dimiliki Kabupaten Ngawi cukup besar terutama pada industri barang atau kerajinan kayu yang merupakan penyumbang terbesar di industri pariwisata yaitu sejumlah 57,95%. Hal ini tinggal bagaimana respon Pemerintah Kabupaten Ngawi dalam mengembangkan potensi industri tersebut. Jika industri tersebut dapat dikembangkan secara optimal, maka jelas akan dapat menambah pendapatan asli daerah yang merupakan salah satu sumber pendapatan daerah. Lebih-lebih jika dilihat dari jumlah tenaga kerja yang terserap dalam industri tersebut mencapai 37.937 orang dengan total omset sebesar Rp. 90.753.251.000,-, maka jelas ini merupakan suatu peluang yang perlu digarap secara serius dan dikembangkan. Hal ini terutama menyangkut penanganan dalam pemasaran hasil industri, yaitu Pemerintah Ngawi harus dapat membantu memasarkan produk yang sudah jadi sehingga perputaran modal dapat berjalan cepat.

#### 4. Industri Unggulan Kabupaten Ngawi

Industri Unggulan Kabupaten Ngawi dapat dilihat tabel dibawah ini :

**Tabel 4.3. Industri Unggulan Kabupaten Ngawi Tahun 2010**

No	Jenis Industri	Jumlah	Tenaga Kerja	Prosentase
1.	Tempe dan Kripik Tempe	1.116	3.607	64.35%
2.	Kayu unik / primitive	8	60	1.07%
3.	Tas plastik	1.024	1.897	33.84%
4.	Konveksi	5	41	0.73%
	Jumlah	2.153	5.665	100%

Sumber : BPS Kabupaten Ngawi, 2010

Dengan adanya produk unggulan yang proses pemasarannya tidak hanya meliputi wilayah Kabupaten Ngawi, tetapi telah menyebar ke berbagai wilayah di

sekitar dan bahkan sampai ke ibukota, maka hal ini juga perlu mendapatkan penanganan yang serius dari Pemerintah Kabupaten Ngawi melalui dinas terkait, seperti Dinas Koperasi dan Perindustrian. Hal ini terutama menyangkut pemasaran hasil produksi kerajinan tersebut guna meningkatkan pendapatan asli daerah. Berdasarkan jumlah tenaga kerja yang terserap dalam industri unggulan di atas maka industri yang menyerap tenaga kerja terbanyak adalah industri tempe dan tempe kripek yang merupakan makanan khas di Kabupaten Ngawi yaitu sebesar 64,35% sehingga industri ini layak untuk dicermati dan dikembangkan selain untuk mengurangi pengangguran juga sebagai daya tarik wisatawan di Kabupaten Ngawi.

#### 5. Hotel dan Penginapan di Kabupaten Ngawi

Hotel dan Penginapan di Kabupaten Ngawi dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 4.4. Daftar Hotel dan Penginapan di Kabupaten Ngawi**

No	Nama Hotel	Alamat
1	Hotel Sukowati	Jl. S. Sukowati, Ds. Karangasri
2	Hotel SAA Nuansa	Jl. Yos Sudarso, Ds. Margomulyo
3	Hotel Maksum	Jl. Suryo, Ds. Grudo
4	Hotel Wahyu I	Jl. A. Yani, Ds. Margumulyo
5	Hotel Wahyu II	Jl. S. Parman, Ds. Beran
6	Losmen ASRI	Jl. A. Yani, Ds. Beran
7	Penginapan Rukun SH	Jl. A. Yani, Ds. Margumulyo
8	Penginapan Wajar	Jl. A. Yani, Ds. Margumulyo
9	Penginapan Menanti	Jl. Yos Sudarso, Ds. Margomulyo
10	Penginapan Mina	Jl. A. Yani, Ds. Margumulyo

Sumber : Disporabudpar Kabupaten Ngawi, 2010

Jumlah hotel di Kabupaten Ngawi relatif sedikit yaitu hanya 10 hotel. Sedang jika dilihat dari kelas hotel ada 2 yaitu, Hotel Melati I hanya ada (satu) yaitu Hotel Sukowati, sedangkan yang lain termasuk kategori kelas Hotel Melati

II. Perlu dikemukakan di sini bahwa untuk hotel tidak dikenai Retribusi, namun dikenai pajak sehingga tidak dimasukkan dalam pembahasan pada penelitian ini karena dalam permasalahan hanya dibatasi tentang Retribusi. Selain itu penarikan pajak dilakukan langsung oleh Dinas Perpajakan yang dibawah kendali Kantor Wilayah Pajak Jawa Timur.

### 6. Restoran dan Rumah Makan

Restoran dan Rumah Makan di Kabupaten Ngawi dapat dilihat tabel dibawah ini

**Tabel 4.5. Daftar Restoran dan Rumah Makan di Kabupaten Ngawi, 2010**

NO	NAMA RUMAH MAKAN	ALAMAT	JENIS MASAKAN
1.	Duta I dan II	Jl.Raya Ngawi –Solo km 6 Telp. 746014	Indonesia, Cina, Eropa
2.	Accord I	Jl.Dr.Wahidin 4 Ngawi Telp.749144	Indonesia, Cina, Eropa
3.	Kartika Dwi Paksi	Jl.Raya Ngawi Caruban Telp.746149	Indonesia, Cina, Eropa
4.	Accord II	Jl.Raya Ngawi-Caruban Telp.747744	Indonesia, Cina, Eropa
5.	Soponyono Permai	Jl.Basuki Rachmat Ngawi Telp.749631	Indonesia, Cina, Eropa
6.	Notosuman	Jl.PB.Sudirman 86 Ngawi telp.749491	Indonesia, Cina, Eropa
7.	Kurnia Jawa Timur	Jl.RayaNgawi Solo km.7	Indonesia, Cina, Eropa
8.	Putra Jawa Timur	Jl.RayaNgawi Solo km.7	Indonesia, Cina, Eropa
9.	Tunas Muda	Jl.Raya Ngawi-Solo	Indonesia, Cina, Eropa
10.	Padang Damri	Jl.PB.Sudirman-Ngawi	Indonesia
11.	Padang Alpacino	Jl. Yos Sudarso Telp.745512	Indonesia
12.	Kondang	Jl.Raya Ngawi-Solo <i>commit to user</i>	Indonesia

NO	NAMA RUMAH MAKAN	ALAMAT	JENIS MASAKAN
13.	Sederhana	Jl. Raya Ngawi-Solo	Indonesia
14.	RM. Jempol Jaya	Jl. Raya Ngawi-Solo, Ds. Watualang	Indonesia
15.	RM. Numani	Jl. Diponegoro, Ds. Pelem	Indonesia
16.	RM. Murah Meriah	Jl. Dr. Soetomo, Ds. Ketanggi	Indonesia
18.	RM. Padang Mama Saiyo	Jl. Basuki Rahmat, Ds. Margomulyo	Indonesia
19.	RM. Suminar	Jl. Basuki Rahmat, Ds. Margomulyo	Indonesia

Sumber : DPPKA Kabupaten Ngawi, 2010

Jumlah restoran dan rumah makan di wilayah Kabupaten Ngawi relatif banyak, yaitu mencapai 27 buah. Dari sejumlah rumah makan tersebut rata-rata hanya menyediakan jenis masakan Indonesia, sedang untuk restoran ataupun rumah makan kategori besar ada yang menyediakan jenis masakan asing, misalnya masakan ala Cina dan Eropa. Untuk restoran dan rumah makan tidak dikenai Retribusi namun dikenai pajak. Biasanya dalam nota pesanan setelah dijumlah harga yang harus dibayar kemudian ditambah 10% untuk pajak pertambahan nilai (PPN). Dengan banyaknya jumlah restoran dan rumah makan tersebut, maka hal ini memberi kesempatan kepada para pelancong untuk dapat memilih menu masakan yang sesuai dengan selera mereka. Dalam hal harga masih relatif terjangkau bagi kantong para pelancong domestik.



## 7. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Tentang Retribusi Sektor Pariwisata

### a. Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2002 Tentang Retribusi Ijin Perindustrian, Perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan

Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 26 Tahun 2002 tentang Retribusi Ijin Perindustrian, Perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan, mengatur tentang Retribusi ijin perindustrian, Retribusi ijin perdagangan, Retribusi pendaftaran perusahaan, Retribusi ijin kios pasar non inpres, dan Retribusi ijin dasaran pasar. Dua jenis Retribusi yang disebut terakhir tersebut sering disebut Retribusi Pelayanan Pasar (khusus tentang perijinan) yang dikelola oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Kabupaten Ngawi. Adapun ketentuan pembayaran Retribusi untuk ijin kios sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2002 dibedakan sesuai klasifikasi pasar. Perlu diketahui yang termasuk klasifikasi pasar kelas IA adalah Pasar Ngawi, Pasar Walikukun, Pasar Ngrambe, dan Pasar Paron. Untuk kelas IB meliputi Pasar Kedunggalar, Pasar Kendal, Pasar Jogorogo, Pasar Sembung, Pasar Karangjati, dan Pasar Beran. Untuk pasar kelas IIA meliputi Pasar Sine, Pasar Samben, Pasar Kedungprahu, Pasar Padas, dan Pasar Gentong. Sedang kelas IIB meliputi Pasar Ngale, Pasar Simo, Pasar Ngancar, dan Pasar Mluwur.

Adapun besarnya Retribusi ijin kios ditetapkan sebagai berikut: untuk pasar kelas IA dan IB ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- per meter persegi, sedangkan untuk pasar kelas II A, dan IIB sebesar Rp. 1.500,- per meter

persegi. Sementara itu untuk pembayaran Retribusi ijin dasaran pasar ditentukan sebagai berikut : untuk pasar kelas IA dan IB sebesar Rp. 600,- per meter persegi, sedang untuk pasar kelas IIA dan IIB ditetapkan sebesar Rp. 300,- per meter persegi.

b. Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2002 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga

Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 29 Tahun 2002 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga, mengatur tentang Retribusi kunjungan tempat rekreasi (terdiri dari: tanda masuk perorangan, tanda masuk kendaraan, penggunaan fasilitas tempat rekreasi, kios di dalam maupun di sekitar tempat rekreasi, tempat parkir khusus di lingkungan tempat rekreasi) dan penggunaan lapangan olah raga (terdiri dari : lapangan sepak bola, lapangan tenis, lapangan bola volly, tenis meja, bulu tangkis, penggunaan lapangan untuk pertunjukan, pertunjukan pasar malam, penggunaan gedung pertemuan Eko Kapti).

Adapun tarif Retribusi diatur sebagai berikut : tanda masuk tempat rekreasi sebesar Rp. 1.000,- per orang, tanda masuk kendaraan bus/truk sebesar Rp. 2.000,-, tanda masuk kendaraan mobil lainnya sebesar Rp. 1.000,-, tanda masuk kendaraan roda dua sebesar Rp. 500,- Sedangkan untuk Retribusi penggunaan fasilitas tempat rekreasi diatur sebagai berikut: kamar kecil sebesar Rp. 300,-, fasilitas pemancingan Rp. 5.000,-, fasilitas kolam renang sebesar Rp. 3.000,-, fasilitas kios dan fasilitas lainnya sebesar Rp. 1.000,-.

Adapun obyek rekreasi yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Ngawi meliputi Museum Trinil yang terletak di Desa Ngale Kecamatan Kedunggalar, Waduk Pondok berada di wilayah Kecamatan Bringin, Pemandian Tawun berada di wilayah Desa Tawun Kecamatan Kasreman, Gunung Warak (menara micro-wave dan wisata alam pegunungan) terletak di wilayah kecamatan Ngrambe, Sumber air Cekok Mondol (sumber air bersih dan wisata alam pegunungan) berada di wilayah Kecamatan Kendal, Jamus (perkebunan teh, sumber air bersih dan wisata alam pegunungan) terletak di Desa Jamus Kecamatan Sine, Waduk Kali Bening (wisata alam) terletak di wilayah Kecamatan Karangjati, dan Pemandian Margok Mustika Warih yang terletak di kawasan hutan milik Perum Perhutani KPH Ngawi wilayah Kecamatan Kedunggalar, dan Air terjun Srambang di wilayah Kecamatan Jogorogo.

Untuk Retribusi penggunaan lapangan olah raga diatur sebagai berikut: lapangan sepak bola sebesar Rp. 20.000,- per hari (untuk pertandingan tanpa memungut biaya), untuk pertandingan yang memungut biaya sebesar Rp. 50.000,- per hari, sedangkan untuk latihan dikenai Retribusi sebesar Rp. 10.000,- per hari. Demikian pula untuk lapangan tenis, besarnya Retribusi sama dengan sepak bola. Retribusi tenis meja dan bulutangkis diatur sebagai berikut: untuk pertandingan tanpa memungut biaya di dalam gedung sebesar Rp. 20.000,- per hari, sedang jika di luar gedung sebesar Rp. 10.000,- per hari. Untuk pertandingan memungut biaya dikenai Retribusi sebesar Rp. 50.000,- per hari (di dalam gedung) dan Rp. 35.000,- (di luar gedung), sedangkan untuk

latihan Rp. 7.500,- per hari. Adapun tarif Retribusi pertunjukan pasar malam ditetapkan sebesar Rp. 500,- per meter persegi per hari. Pertunjukan pasar malam biasanya menggunakan area alun-alun, sedang untuk pentas musik biasanya menggunakan stadion.

#### **8. Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Dari Retribusi Sektor Pariwisata**

Perolehan dana dari retribusi sektor pariwisata ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu besarnya sumbangan retribusi sektor pariwisata terhadap pendapatan asli daerah dan prosentase besarnya retribusi pariwisata terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Ngawi.

##### **a. Besarnya Sumbangan Retribusi Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah**

Yang dimaksud besarnya sumbangan retribusi sektor pariwisata terhadap pendapatan asli daerah ini adalah sejumlah dana yang berasal dari retribusi sektor pariwisata yang berhasil disetor ke kas daerah Kabupaten Ngawi dan dicatat sebagai penerimaan pendapatan asli daerah.

##### **b. Prosentase Besarnya Sumbangan Retribusi Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ngawi**

Yang dimaksud prosentase besarnya sumbangan retribusi sektor pariwisata terhadap pendapatan asli daerah di sini adalah perbandingan antara penerimaan retribusi sektor pariwisata secara keseluruhan dengan total pendapatan asli daerah Pemerintah Kabupaten Ngawi. Prosentase ini dimaksudkan untuk mengetahui kualifikasi besarnya sumbangan retribusi sektor pariwisata terhadap pendapatan asli daerah.

## B. Hasil Analisis dan Pembahasan

### 1. Perkembangan Pendapatan Sektor Pariwisata

Pendapatan dari sektor pariwisata di Kabupaten Ngawi yang termasuk dalam penerimaan daerah 2003-2010 mengalami peningkatan dari Tahun ke Tahun. Untuk menghitung atau mengukur laju pertumbuhan retribusi sektor pariwisata di Kabupaten Ngawi setiap Tahunnya selama kurun waktu pengamatan sepuluh Tahun terakhir mulai Tahun 2003-2010 dapat dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut.

Pertumbuhan retribusi pariwisata

$$\Delta RP_t = \frac{RP_t - RP^{(t-1)}}{RP^{(t-1)}} \times 100 \%$$

Dimana :

$\Delta RP_t$  = laju pertumbuhan (*Rate of growth*) retribusi pariwisata

$RP_t$  = Retribusi pariwisata

$t$  = Tahun tertentu

$(t - 1)$  = Tahun sebelumnya.

Secara terperinci perkembangan tingkat pertumbuhan pendapatan dari sektor pariwisata dapat dilihat pada tabel 4.6 sebagai berikut:

**Tabel 4.6 Pertumbuhan Realisasi dan Tingkat Pertumbuhan Pendapatan Sektor Pariwisata di Kabupaten Ngawi Tahun 2003-2010**

No	Tahun	Pendapatan Pariwisata (Rp)	Pertumbuhan (%)
1	2003	58,733,000	-
2	2004	66,322,000	12,92%
3	2005	67,330,250	1,52%
4	2006	73,676,000	9,42%
5	2007	85,747,500	16,38%
6	2008	87,593,000	2,15%
7	2009	96,503,000	10,17%
8	2010	99,250,750	2,85%
	Rata-rata	-	7,92%

Sumber : Analisis data sekunder

Dari analisis data diatas dapat dilihat bahwa pertumbuhan realisasi pendapatan sektor pariwisata selama kurun waktu Tahun 2003-2010 tingkat pertumbuhan rata-rata 7,92 persen. Secara rinci pertumbuhan Tahun 2004 sebesar 12,92 persen, Tahun 2005 sebesar 1,52 persen, Tahun 2006 sebesar 9,42 persen, Tahun 2007 sebesar 16,38 persen, Tahun 2008 sebesar 2,15 persen, Tahun 2009 sebesar 10,17 persen, dan Tahun 2010 sebesar 2,85 persen.

Secara nominal perkembangan realisasi pendapatan sektor pariwisata daerah di Kabupaten Ngawi menunjukkan adanya peningkatan yaitu dari Rp 58.733.000,00 pada Tahun 2003 menjadi Rp 99.250.750.00 pada Tahun 2010. Tingkat pertumbuhan pendapatan sektor pariwisata terendah terjadi pada Tahun 2005 sebesar 1,52 persen, hal ini disebabkan karena kurang insentifnya Pemerintah Kabupaten Ngawi dalam mengelola potensi wisata di daerah

Kabupaten Ngawi sehingga pendapatan disektor pariwisata menjadi kurang maksimal, sedangkan pertumbuhan pendapatan disektor pariwisata tertinggi terjadi pada Tahun 2004 sebesar 12,92 persen, hal ini disebabkan karena adanya program peningkatan pemberdayaan potensi pariwisata di Kabupaten Ngawi yang akhirnya berdampak pada meningkatnya wisatawan yang datang ke daerah objek wisata di Kabupaten Ngawi dan menjadikan pendapatan sector pariwisata di Kabupaten Ngawi pada Tahun tersebut mengalami peningkatan.

Pendapatan yang diterima Dinas Pariwisata Kabupaten Ngawi tidak sepenuhnya berasal dari semua obyek yang ada di Kabupaten Ngawi. Hanya ada beberapa obyek yang dikelola penuh dan beberapa obyek lainnya yang merupakan bagi hasil. Untuk mengetahui perkembangan sumbangan pendapatan sektor pariwisata terhadap pendapatan asli daerah, dirumuskan dengan menggunakan analisis berikut :

$$\text{Model : } Y_o = a + b X$$

Dimana :

$Y_o$  = Jumlah penerimaan pendapatan pariwisata di Kabupaten Ngawi

$a$  = Konstanta

$b$  = Besar perubahan variabel  $Y$  yang terjadi pada setiap perubahan 1 unit variabel  $X$

$X$  = Tahun

**Tabel 4.7. Perhitungan Pendapatan Pariwisata**

No	Tahun	Pendapatan Pariwisata (Y)	X	X <sup>2</sup>	XY
1.	2003	58,733,000	-3½	12.25	-205,565,500
2.	2004	66,322,000	-2½	6.25	-165,805,000
3.	2005	67,330,250	-1½	2.25	-100,995,375
4.	2006	73,676,000	-½	0.25	-36,838,000
5.	2007	85,747,500	½	0.25	42,873,750
6.	2008	87,593,000	1½	2.25	131,389,500
7.	2009	96,503,000	2½	6.25	241,257,500
8.	2010	99,250,750	3½	12.25	347,377,625
<b>Jml</b>		<b>635,155,500</b>		<b>42</b>	<b>253,694,500</b>

Untuk mencari koefisien a dan b digunakan rumus :

$$a = \frac{\sum Y}{N} \quad N = \text{Jumlah Data} \quad b = \frac{\sum XY}{\sum X^2}$$

Hasil tersebut dimasukkan ke dalam rumus, seperti berikut :

$$a = \frac{635,155,500}{8}$$

$$= 79.394.437,50$$

$$b = \frac{253,694,500}{42}$$

$$= 6.040.345,24$$

Didapatkan persamaan :

$$Y = 79.394.437,50 + 6.040.345,24 X$$

Hasil analisis trend perkembangan pendapatan pariwisata mengalami peningkatan dengan jumlah penerimaan pariwisata Rp 79.394.437,50 dan



pendapatan pariwisata Rp 6.040.345,24 selama kurun waktu Tahun 2003-2010. Dengan meningkatnya pendapatan tersebut diharapkan memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ngawi.

**Tabel 4.8. Hasil Perhitungan Trend Perkembangan Pendapatan Pariwisata**

No.	Tahun	X	$Y = 79.394.437,50 + 6.040.345,24 X$
1.	2011	4½	106,575,991.07
2.	2012	5½	112,616,336.31
3.	2013	6½	118,656,681.55
4.	2014	7½	124,697,026.79

Dari analisis data di atas dapat disimpulkan bahwa perkembangan pendapatan pariwisata mengalami peningkatan dari Tahun ke Tahun. Hal tersebut sebagai keberhasilan dari pemerintah daerah dalam mengelola pariwisata di Kabupaten Ngawi, dimana pemerintah daerah mampu meningkatkan pelayanan, perbaikan dan peningkatan fasilitas publik di lingkungan obyek wisata yang membuat daya tarik tersendiri untuk wisatawan. Sebagai salah satu faktor pendukung dalam peningkatan pendapatan pariwisata yaitu dengan meningkatnya jumlah wisatawan. Selain itu meningkatnya pendapatan pariwisata juga disebabkan diselenggarakannya *event-event* khusus yang menarik minat wisatawan, upaya Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata mempromosikan potensi obyek wisata yang ada di Kabupaten Ngawi serta mengikuti pameran-pameran nasional.

## 2. Kontribusi Pendapatan Sektor Pariwisata

Salah satu potensi yang dapat dijadikan sumber keuangan pada Kabupaten Ngawi adalah pada pemungutan retribusi daerah, khususnya penerimaan retribusi pada sektor pariwisata karena merupakan salah satu komponen dari retribusi daerah dan sebagai salah satu faktor untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ngawi.

Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat diberikan sektor pariwisata terhadap pendapatan asli daerah, seperti berikut :

$$\text{Kontribusi} = \frac{Y_{\text{PAR}}}{\text{PAD}} \times 100\%$$

Keterangan :

$Y_{\text{PAR}}$  = Nilai pendapatan sektor pariwisata

PAD = Nilai PAD

Hasil perhitungan kontribusi sektor pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Ngawi ditabelkan dalam tabel 4.9

**Tabel 4.9 Perhitungan Sektor Pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah ( dalam Rp)**

No	Tahun	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Pendapatan Pariwisata	Kontribusi (%)
1.	2003	16.217.612.222	58.733.000	0,36%
2.	2004	17.889.764.097,52	66.322.000	0,37%
3.	2005	19.995.242.154,48	67.330.250	0,34%
4.	2006	20.735.830.465,98	73.676.000	0,36%
5.	2007	20.911.887.992	85.747.500	0,41%
6.	2008	22.863.251.233,70	87.593.000	0,38%
7.	2009	25.894.094.876,73	96.503.000	0,37%
8.	2010	75.681.353.391	99.250.750	0,13%
	<b>Rata-rata</b>	<b>27.523.629.554,18</b>	<b>79.394.437,50</b>	<b>0,34%</b>

Sumber : Analisis data sekunder

Berdasarkan analisis data di atas maka didapatkan rata-rata pendapatan di bidang pariwisata di Kabupaten Ngawi adalah sebesar Rp 79.394.437,50 selama kurun waktu Tahun 2003-2010.

Perkembangan pendapatan pariwisata menunjukkan kecenderungan meningkat pada Tahun 2007 mencapai 0,41%. Meningkatnya pendapatan pariwisata dapat dilihat dari perkembangan pendapatan sektor pariwisata di Kabupaten Ngawi, namun pendapatan tersebut sayangnya belum semua masuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) karena ada sebagian obyek wisata yang masih menjadi milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Walaupun diharapkan dengan bertambahnya pendapatan sektor pariwisata diharapkan dapat

meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Ngawi. Pemerintah Kabupaten Ngawi perlu untuk berusaha agar aset-aset pariwisata yang masih menjadi milik pemerintah Provinsi Jawa Timur dapat segera dipindah alihkan menjadi milik pemerintah daerah Kabupaten Ngawi.

Kontribusi rata-rata pendapatan pariwisata menunjukkan kecenderungan menurun terhadap pendapatan Daerah di Kabupaten Ngawi selama kurun waktu Tahun 2003-2010 yaitu sekitar 0,13% dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini sesuai dengan keadaan pariwisata di Kabupaten Ngawi yang masih kurang adanya pengelolaan dari Pemerintah Daerah, sehingga belum banyak wisatawan dan pengunjung dari luar daerah Kabupaten Ngawi yang mengetahui tempat-tempat wisata di Kabupaten Ngawi yang potensial untuk dikunjungi. Dalam hal ini yang menyebabkan persentase kontribusi di sektor pariwisata terhadap kontribusi Pendapatan Asli Daerah masih tergolong kecil dan mengalami penurunan sampai dengan Tahun 2010. Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diterima dari potensi daerah yang berupa pajak milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah juga pendapatan daerah yang sah.

Penurunan kontribusi sektor pariwisata tersebut mungkin diakibatkan karena kenaikan pendapatan sektor pariwisata diimbangi pula dengan kenaikan jumlah pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor-sektor lain dengan jumlah yang lebih besar. Sektor pertanian misalnya merupakan salah satu faktor yang menyumbangkan pendapatan yang lebih besar karena sebagian penduduk di Kabupaten Ngawi memiliki pekerjaan sebagai petani, selain itu

daerah Kabupaten Ngawi juga memiliki potensi daerah yang dapat digunakan sebagai lahan pertanian yang sangat luas. Peranan masyarakat sendiri dalam industri pariwisata masih begitu kurang mungkin kurangnya penyuluhan dari pemerintah daerah tentang keuntungan dalam pengelolaan industri pariwisata itu sendiri serta masih minimnya keahlian masyarakat dalam pengelolaan industri pariwisata. Sehingga sektor pariwisata belum dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Ngawi.

Dalam hal ini jumlah wisatawan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap besarnya pendapatan Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Ngawi Ngawi. Untuk itu diperlukan usaha untuk meningkatkan promosi dan perbaikan fasilitas publik obyek wisata, sehingga dapat menarik wisatawan agar berkunjung. Selain itu peningkatan jumlah wisatawan diharapkan akan berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar dengan penjualan cinderamata maupun dalam penyediaan tempat-tempat hunian hotel untuk wisatawan sehingga pendapatan masyarakat sekitar juga akan meningkat.

Salah satu potensi jumlah obyek pariwisata mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Ngawi. Hal ini disebabkan karena jumlah obyek wisata kaitanya dengan pengelolaan digunakan untuk membiayai semua kegiatan pariwisata di Kabupaten Ngawi yang dilakukan dalam rangka menarik minat

wisatawan, baik wisatawan domestik maupun wisatawan asing untuk meningkatkan pendapatan pariwisata.



## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pengujian hipotesis, maka dapat disimpulkan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Perkembangan pendapatan pariwisata menunjukkan kecenderungan meningkat.

Meningkatnya pendapatan pariwisata dapat dilihat dari perkembangan pendapatan sektor pariwisata di Kabupaten Ngawi, namun pendapatan tersebut sayangnya belum semua masuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) karena ada sebagian obyek wisata yang masih menjadi milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Walaupun diharapkan dengan bertambahnya pendapatan sektor pariwisata diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Ngawi. Pemerintah Kabupaten Ngawi perlu untuk berusaha agar aset-aset pariwisata yang masih menjadi milik pemerintah Provinsi Jawa Timur dapat segera dipindah alihkan menjadi milik pemerintah daerah Kabupaten Ngawi.

2. Penurunan kontribusi sektor pariwisata tersebut diakibatkan karena kenaikan pendapatan sektor pariwisata diimbangi pula dengan kenaikan jumlah pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor-sektor lain dengan jumlah yang lebih besar. Sektor pertanian misalnya merupakan salah satu faktor yang menyumbangkan pendapatan yang lebih besar karena sebagian penduduk di Kabupaten Ngawi memiliki pekerjaan sebagai petani, selain itu daerah

*commit to user*

Kabupaten Ngawi juga memiliki potensi daerah yang dapat digunakan sebagai lahan pertanian yang sangat luas. Peranan masyarakat sendiri dalam industri pariwisata masih begitu kurang mungkin kurangnya penyuluhan dari pemerintah daerah tentang keuntungan dalam pengelolaan industri pariwisata itu sendiri serta masih minimnya keahlian masyarakat dalam pengelolaan industri pariwisata. Sehingga sektor pariwisata belum dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Ngawi.

## B. Saran

Berdasarkan pengamatan terhadap penerimaan daerah sektor pariwisata di Kabupaten Ngawi, maka dapat disampaikan saran-saran sebagai berikut :

1. Pemerintah Kabupaten Ngawi perlu terus meningkatkan pelayanan publik di daerah wisata seperti kebersihan, kenyamanan dan pelayanan sehingga dapat meningkatkan jumlah wisatawan. Karena saat ini fasilitas publik di tempat wisata Kabupaten Ngawi kurang begitu baik. Selain itu jika jumlah wisatawan dapat meningkat dari tahun ke tahun maka diharapkan pendapatan pariwisata dapat meningkat juga. Namun pemerintah juga harus dapat mengoptimalkan agar pengeluaran yang di keluarkan tidak melebihi pendapatan yang masuk.
2. Pemerintah Kabupaten Ngawi harus terus berupaya meningkatkan strategi pemasaran pariwisata yang berdasarkan pada prioritas pengembangan obyek wisata, pangsa pasar, media yang tepat, pola kerja sama dan kemitraan serta promosi yang berkesinambungan. Promosi dapat dilakukan melalui berbagai



kegiatan-kegiatan pariwisata yang berupa *event-event* seperti *festival-festival*, *lomba-lomba*, *bazar*, *pentas seni (campur sari, wayang)* yang dilakukan dalam rangka menarik minat wisatawan, baik wisatawan domestik maupun wisatawan asing yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan. Bahkan bisa melakukan kerja sama dengan pemerintah Kabupaten lain atau instansi terkait untuk memperluas promosi pariwisata. Selain itu karena industri pariwisata memerlukan dana investasi yang besar dengan jangka panjang maka pemerintah juga perlu untuk menarik para investor yang berminat menanamkan modalnya bagi perkembangan pariwisata di Kabupaten Ngawi. Hal ini disebabkan karena investasi di sektor pariwisata sangat penting bagi pemerintah Kabupaten Ngawi untuk menumbuhkan sektor-sektor ekonomi lainnya.

4. Koordinasi antar instansi atau dinas yang menangani masalah Retribusi sektor pariwisata harus dilakukan secara terus menerus, sehingga jika terjadi permasalahan sekecil apapun yang menghambat efektivitas pelaksanaan perda Retribusi sektor pariwisata dapat segera diatasi. Dengan begitu optimalisasi pendapatan Retribusi sektor pariwisata dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dapat terwujud.